



SEJARAH AWAL PEMBUATAN UANG ORI (OEANG REPOEBLIK
INDONESIA) DAN PERKEMBANGANNYA SEBAGAI MATA UANG
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1946 – 1950

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka menyelesaikan studi strata 1
Untuk mencapai gelar Sarjana Sosial

Disusun oleh :

Nama : Ingrid Sarasati

NIM : 3111411016

Jurusan/Prodi: Sejarah/ Ilmu Sejarah

JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “SEJARAH AWAL PEMBUATAN UANG ORI (OEANG REPOEBLIK INDONESIA) DAN PERKEMBANGANNYA SEBAGAI MATA UANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1946 – 1950” telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, pada :

Hari :

Tanggal :

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan Sejarah


Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A.

NIP.198003092005011


Dr. Hamdan Tri Atmaja M.Pd.

NIP.196406051989011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Sejarah,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Februari 2017

Mengetahui,

Penguji I

Drs. Abdul Muntholib, M.Hum.
NIP. 195410121989011001

Penguji II

Romadi, S.Pd., M.Hum
NIP. 196912102005011001

Penguji III

Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A.
NIP. 19800300920050011001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

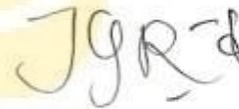


Drs. Moh. Solchatul. Mustofa, MA
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Desember 2016



Ingrid Sarasati
NIM. 3111411016



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada jiwa-jiwa mereka”
– **QS. Ar-Ra’d [13]: 11**
- “Hope is a good things, maybe the best of things, and no good things ever dies”
– **Andy Dufresne, The Shawshank Redemption Movie**
- “Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down” – **Socrates**

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Mamah Budi Riyanti; dan Bapak Aris Hadiyono;
2. Adikku Inneke Putri Fajriyanti;
3. Sahabatku Dimas Aryo Prakoso;
4. Teman-teman Jurusan Sejarah 2011;
5. Almamater Unnes

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah mengaruniakan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “SEJARAH AWAL PEMBUATAN UANG ORI (OEANG REPOEBLIK INDONESIA) DAN PERKEMBANGANNYA SEBAGAI MATA UANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1946 – 1950”.

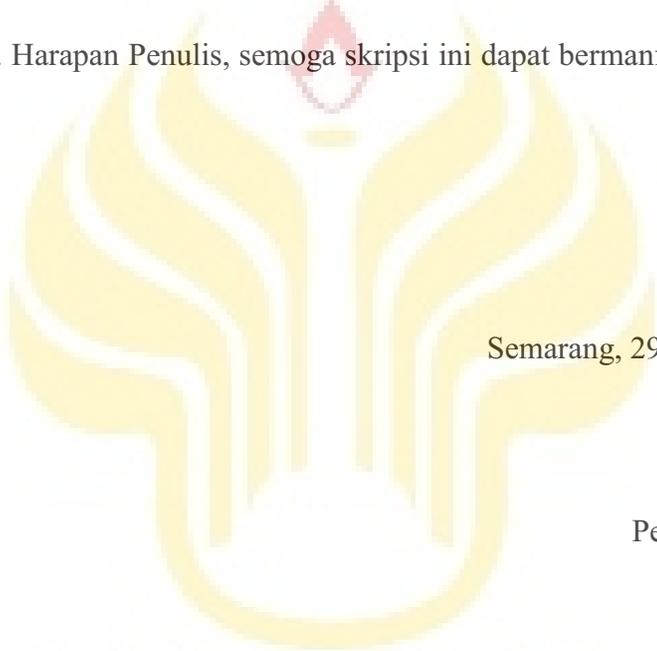
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dengan segala kebijakannya.
2. Drs. Moh. Solehatul. Mustofa, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Hamdan Tri Atmaja M. Pd., selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A. yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan karyawan di Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menjalani masa kuliah.
6. Keluarga tercinta Mamah, Bapak, Adik, beserta keluarga besar yang telah sabar menunggu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta telah memberikan semangat dan kasih sayang tanpa batas.
7. Dimas Aryo Prakoso, Diah Ayu Kartikasari, dan Faizal Imam, terimakasih untuk tidak pernah lupa memberikan motivasi dan dukungan semangat, sehingga penulis mampu mengalahkan rasa malas, dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun terlambat.
8. Teman-Teman dalam Restu Ibu Crew, NCFC, Point Coffeeshop, Nimco Store Semarang, Cassa Coffee, terimakasih untuk selalu menjadi tempat pulang ketika penulis tidak ingin pulang.
9. Teman-teman MUSE Prodi Ilmu Sejarah dan Jurusan Sejarah angkatan 2011, khususnya Rizki Darmawan dan Sena Febi Prabowo, terimakasih telah mendukung dan bersama-sama berusaha untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang kita emban.
10. Kepada diri saya sendiri yang telah mampu mengalahkan rasa malas, dan tidak menyerah dalam penulisan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.



Semarang, 29 Desember 2016

Penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Sarasati, Ingrid. 2016. *Sejarah Awal Pembuatan Uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) dan Perkembangannya Sebagai Mata Uang Republik Indonesia Tahun 1946 – 1950*. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A.

Kata Kunci: *Sejarah Uang, Oeang Repoeblik Indonesia, Revolusi Kemerdekaan*

Perjuangan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia, tidak hanya membutuhkan tenaga, taktik, dan strategi, tetapi juga membutuhkan dana untuk membiayai perjuangannya. Selain itu, dalam suasana kacau akibat perang, kebutuhan bahan pokok masyarakat Indonesia tetap harus dipenuhi. Pada masa awal kemerdekaan, situasi ekonomi Indonesia dalam kondisi yang sangat kacau. Masalah ekonomi tersebut bukan hanya menyangkut masalah moneter/ uang saja, tetapi juga masalah politik dan sosial masyarakat Indonesia.

Kekacauan situasi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan, bersumber pada beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali. Hal tersebut mengakibatkan *hiperinflasi*, atau laju inflasi sangat tinggi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat banyak, ditambah lagi pihak Belanda juga mengeluarkan uang baru yang disebut uang NICA, sebagai uang yang berlaku di daerah pendudukan. Pada masa awal kemerdekaan, kebijakan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam bidang moneter berfokus pada tujuan untuk menghentikan inflasi tersebut. Kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan *sanering* uang, yaitu tindakan pemerintah untuk menghilangkan kondisi mata uang tidak sehat yang beredar dalam masyarakat, dengan cara memperbaharui nilai mata uang atau menggantinya dengan mengeluarkan uang baru. Oleh karena itu, Pemerintah RI mengeluarkan Oeang Repoeblik Indonesia (Uang ORI).

Tindakan Pemerintah RI pada mulanya mengeluarkan ketetapan jenis uang yang dianggap berlaku, karena belum memiliki mata uang sendiri. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan Pinjaman Nasional, dan Kewajiban Menyimpan Uang dalam Bank, untuk menarik uang dari peredaran sebagai tahap persiapan pengeluaran Uang ORI.

Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 30 Oktober 1946, Uang ORI mulai diedarkan. Dasar hukum pengeluaran Uang ORI adalah Undang-Undang no.17 th.1946 dan Undang-Undang no.19 th.1946. Secara politis Uang ORI memiliki arti penting sebagai lambang kemerdekaan dan alat perjuangan revolusi. Secara ekonomis Uang ORI adalah langkah awal pengembalian sistem moneter, yang menunjukkan Pemerintah RI mampu mengeluarkan alat pembayaran yang sah, dan dipercaya oleh rakyat Indonesia. Suatu simbol yang menegaskan bahwa Pemerintah RI telah mampu, dan berdaulat secara penuh atas kemerdekaan bangsa Indonesia.

ABSTRACT

Sarasati, Ingrid. 2016. *The History of Making and the Development of ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) as Indonesian Currency In the Year of 1946 – 1950.* Essay. History Department. Faculty of Social. Semarang State University. Advisor Mukhamad Shokheh, S.Pd., M.A.

Keywords: *History of Money, Oeang Repoeblik Indonesia, Independence Revolution*

The struggle to accomplish Indonesian Independence, not only needs people power, tactics, and strategies, but also needs a funds to finance during the War of Independence. Besides that, during the chaos of war, the basic needs of Indonesian citizenry still needs to get fulfilled. On the early Independence of Indonesian, the economic situation was really in problematic. The economic problems not only talked about the monetary state problem, but also about the country's political and Indonesian society's problem.

On the early Independence periode, the chaos of economic condition caused by the unrestrained circulation of Japanese Currency in Indonesian society. This resulted in hyperinflation. The amount of circulated money in Indonesian Society back then was countless, coupled with new federal money for the occupied territories produced by NICA (*Nederlandsch-Indie Civil Administratie*). The economic policy that taken by Indonesian Government on the early independence periode, was to stop the hyperinflation, by did a *sanering*. *Sanering* is a Government's measure to deaden the unhealthy economic condition, by reform the valid currency or replace it with a new one. That was why the Indonesian Government produced *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)*.

The first measure of Indonesian Government was established the kinds of valid currencies, because Indonesian Government did not have its own currency yet. After that, Indonesian Government established an act about *Pinjaman Nasional 1946*, and *Kewajiban Menyimpan Uang dalam Bank* to collected the circulated currencies as preparation to released the ORI.

After went through a long process, on October 30th, 1946, ORI was released. Legal basis for the released of ORI is *Undang-Undang no. 17 th.1946* and *Undang-Undang no.19 th.1946*. Politically, the released of ORI have a deep means; as an Indonesian Independence symbol; and an instrument of Indonesian Revolution. Economically, the released of ORI was the initial step to support monetary state system, which shows that Indonesian Government was capable to produced its own currency, and got the society's trust. A symbol that confirms, that Indonesian Government was capable and have a full sovereign to the Independence of Indonesian Nation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PEGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Tinjauan Pustaka.....	14

G. Metode Penelitian.....	19
H. Landasan Teori dan Pendekatan.....	25
I. Sistematika Penulisan	27

BAB II KONDISI REPUBLIK INDONESIA PADA SAAT PEMBERLAKUAN

UANG ORI.....	30
A. Bentuk Penggunaan Uang Sebelum Pemberlakuan Uang ORI.....	30
1. Penggunaan Uang Pada Masa Hindia Belanda	31
2. Penggunaan Uang Pada Masa Pendudukan Jepang	36
B. Kejadian-Kejadian Penting di Bidang Politik.....	39
1. Konflik Intern Pemerintahan Republik Indonesia.....	43
2. Jalur Diplomasi Dalam Menghadapi Agresi Militer Belanda.....	49
3. Pindahnya Ibukota Republik ke Yogyakarta.....	56
4. Konferensi Meja Bundar	58
C. Kejadian-Kejadian Penting di Bidang Ekonomi	61
1. Hiperinflasi Uang Jepang.....	61
2. Belanda Menyerang dengan Uang NICA	65
3. Menembus Blokade Ekonomi Belanda.....	77

BAB III PEMBERLAKUAN UANG ORI DAN PERKEMBANGANNYA PADA

MASA AWAL KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA	80
A. Persiapan Pemberlakuan Uang ORI.....	80
1. Usulan Mengeluarkan Uang ORI.....	80

2. Pinjaman Nasional 1946	82
3. Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank	90
B. Proses Pemberlakuan Uang ORI.....	95
1. Persiapan Percetakan Uang ORI	95
2. Pengeluaran Uang ORI	99
3. Pemberlakuan Uang ORI	101
4. Keadaan Ekonomi Indonesia Pasca Pemberlakuan Uang ORI.....	106
C. Perkembangan Uang ORI	114
D. Penarikan Uang ORI	127
BAB IV PENGARUH UANG ORI DALAM BIDANG POLITIK DAN SOSIAL	
EKONOMI	130
A. Bidang Politik	130
B. Bidang Sosial Ekonomi.....	133
BAB V KESIMPULAN.....	141
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN.....	152

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kenaikan Harga Barang Setelah Revolusi	64
Tabel 2. Ketetapan Harga Barang dengan Uang ORI.....	106
Tabel 3. Ketetapan Harga Barang Setelah Uang ORI Beredar	109
Tabel 4. Kenaikan Harga Barang Setelah Uang ORI Beredar	110
Tabel 5. Kurs Uang ORI terhadap Uang Luar Negeri	134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Uang ORI pecahan 1 Sen; Djakarta, 17 Oktober 1945	117
Gambar 2. Uang ORI pecahan 5 Sen; Djakarta, 17 Oktober 1945.	117
Gambar 3. Uang ORI pecahan 10 Sen; Djakarta, 17 Oktober 1945	117
Gambar 4. Uang ORI pecahan ½ Rupiah; Djakarta, 17 Oktober 1945.....	117
Gambar 5. Uang ORI pecahan 1 Rupiah; Djakarta, 17 Oktober 1945.....	117
Gambar 6. Uang ORI pecahan 5 Rupiah; Djakarta, 17 Oktober 1945.....	117
Gambar 7. Uang ORI pecahan 10 Rupiah; Djakarta, 17 Oktober 1945.....	118
Gambar 8. Uang ORI pecahan 100 Rupiah; Djakarta, 17 Oktober 1945.....	118
Gambar 9. Uang ORI pecahan 5 Rupiah; Djogjakarta, 1 Djanuari 1947.....	118
Gambar 10. Uang ORI pecahan 10 Rupiah; Djogjakarta, 1 Djanuari 1947.....	118
Gambar 11. Uang ORI pecahan 25 Rupiah; Djogjakarta, 1 Djanuari 1947.....	119
Gambar 12. Uang ORI pecahan 100 Rupiah; Djogjakarta, 1 Djanuari 1947.....	119
Gambar 13. Uang ORI pecahan ½ Rupiah; Djogjakarta, 26 Djuli 1947	119
Gambar 14. Uang ORI pecahan 2½ Rupiah; Djogjakarta, 26 Djuli 1947	119
Gambar 15. Uang ORI pecahan 25 Rupiah; Djogjakarta, 26 Djuli 1947	120
Gambar 16. Uang ORI pecahan 50 Rupiah; Djogjakarta, 26 Djuli 1947	120
Gambar 17. Uang ORI pecahan 100 Rupiah A; Djogjakarta, 26 Djuli 1947.....	120
Gambar 18. Uang ORI pecahan 100 Rupiah B; Djogjakarta, 26 Djuli 1947.....	120
Gambar 19. Uang ORI pecahan 250 Rupiah; Djogjakarta, 26 Djuli 1947	120
Gambar 20. Uang ORI pecahan 40 Rupiah; Djogjakarta, 23 Agustus 1948.....	121
Gambar 21. Uang ORI pecahan 75 Rupiah; Djogjakarta, 23 Agustus 1948.....	121

Gambar 22. Uang ORI pecahan 100 Rupiah; Djogjakarta, 23 Agustus 1948.....	121
Gambar 23. Uang ORI pecahan 400 Rupiah; Djogjakarta, 23 Agustus 1948.....	122
Gambar 24. Uang ORI pecahan 600 Rupiah; Djogjakarta, 23 Agustus 1948.....	122
Gambar 25. Uang ORI pecahan 10 Sen; Djogjakarta, 17 Agustus 1949	123
Gambar 26. Uang ORI pecahan 10 Sen; Djogjakarta, 17 Agustus 1949	123
Gambar 27. Uang ORI pecahan $\frac{1}{2}$ Rupiah A; Djogjakarta, 17 Agustus 1949....	123
Gambar 28. Uang ORI pecahan $\frac{1}{2}$ Rupiah B; Djogjakarta, 17 Agustus 1949....	124
Gambar 29. Uang ORI pecahan 10 Rupiah; Djogjakarta, 17 Agustus 1949.....	124
Gambar 30. Uang ORI pecahan 1 Rupiah; Djogjakarta, 17 Agustus 1949.....	124
Gambar 31. Uang ORI pecahan 100 Rupiah; Djogjakarta, 17 Agustus 1949.....	125



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kan Po, No. Istimewa Th. II, Maret 1943	153
Lampiran 2. Kan Po, No. 5 Th. II, Oktober 1942.....	154
Lampiran 3. Garis Van Mook	155
Lampiran 4. Ekonomi no. 11-12 th. I, 25 Agustus – 10 September 1946.....	156
Lampiran 5. Merdeka, 6 Agustus 1946.....	159
Lampiran 6. Kedaulatan Rakjat, 18 Maret 1946	160
Lampiran 7. Kedaulatan Rakyat, 23 Agustus 1946.....	161
Lampiran 8. Kedaulatan Rakyat, 1 November 1945.....	162
Lampiran 9. Pandji Ra'jat, 7 Maret 1946.....	162
Lampiran 10. Kedaulatan Rakjat, 8 Maret 1946	163
Lampiran 11. Kedaulatan Rakjat, 18 Maret 1946	164
Lampiran 12. Ekonomi no. 11-12 th. I, 25 Agustus – 10 September 1946.....	165
Lampiran 13. Kedaulatan Rakjat, 1 Juni 1946.....	166
Lampiran 14. Kedaulatan Rakjat, 8 Juni 1946.....	167
Lampiran 15. Merdeka, 12 September 1946.....	168
Lampiran 16. Kedaulatan Rakjat, 22 Agustus 1946	169
Lampiran 17. Kedaulatan Rakjat, 4 Oktober 1946	170
Lampiran 18. Merdeka, 14 Oktober 1946.....	171
Lampiran 19. Merdeka, 29 Oktober 1946.....	172
Lampiran 20. Kedaulatan Rakjat, 30 Oktober 1946	173
Lampiran 21. Kedaulatan Rakjat, 29 Oktober 1946	174

Lampiran 22. Kedaulatan Rakjat, 26 Oktober 1946	175
Lampiran 23. Kedaulatan Rakjat, 6 November 1946.....	176
Lampiran 24. Kedaulatan Rakjat, 12 November 1946.....	177
Lampiran 25. Kedaulatan Rakjat, 12 September 1946	178
Lampiran 26. Kedaulatan Rakjat, 5 November 1946.....	178
Lampiran 27. Kedaulatan Rakjat, 13 Februari 1947	179
Lampiran 28. Kedaulatan Rakjat, 23 November 1946.....	180
Lampiran 29. Kedaulatan Rakjat, 9 Maret 1950	181
Lampiran 30. Kedaulatan Rakjat, 21 Maret 1950	182
Lampiran 31. Kedaulatan Rakjat, 27 Maret 1950	183
Lampiran 32. Kedaulatan Rakjat, 30 November 1946.....	183
Lampiran 33. Kedaulatan Rakjat, 5 Desember 1946	184
Lampiran 34. Kedaulatan Rakjat, 6 November 1946.....	185
Lampiran 35. Undang-Undang no. 17 th. 1946	186
Lampiran 36. Undang-Undang no. 18 th. 1946	187
Lampiran 37. Undang-Undang no. 19 th. 1946	192
Lampiran 38. Undang-Undang no. 17 th. 1944	192
Lampiran 39. Kedaulatan Rakjat, 6 Oktober 1946	197
Lampiran 40. Uang De Javasche Bank	200
Lampiran 41. Uang Pendudukan Jepang.....	201
Lampiran 42. Uang “Merah ” NICA.....	203
Lampiran 43. Macam-macam ORIDA (Oeang Reoeblik Indonesia Daerah).....	204

Lampiran 44. : ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Soematra)206



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

<i>A-metalisme</i>	: Pengeluaran mata uang tanpa jaminan emas.
AFNEI	: <i>Allied Forces Netherlands East Indies</i> ; komando khusus pengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia.
<i>Agresi Militer</i>	: Operasi penyerbuan/ penyerangan militer oleh tentara NICA ke daerah kekuasaan Republik.
<i>Bank sentral</i>	: Bank yang bertanggung jawab atas seluruh kebijakan moneter di suatu negara.
<i>Bank sirkulasi</i>	: Bank yang memiliki hak tunggal untuk mengedarkan uang di suatu negara.
<i>Barter</i>	: Kegiatan tukar menukar barang tanpa perantara uang.
<i>Bea/ Cukai</i>	: Pajak.
<i>Bewustzijn</i>	: Kesadaran; yang didalam skripsi ini mengarah ke kesadaran suatu negara yang merdeka.
BFO	: <i>Bijzonder Federaal Overleg</i> ; suatu organisasi masa revolusi fisik yang mengatur solusi politik untuk negara-negara bagian bentukan NICA.
BKR	: Badan Keamanan Rakyat.
<i>Blokade</i>	: Pengepungan/ penutupan suatu wilayah oleh lawan, untuk mencegah keluar masuknya informasi, bantuan, dsb.
BNI	: Bank Negara Indonesia.
BPKNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.
BRI	: Bank Rakyat Indonesia.
BTC	: <i>Banking and Trading Corporation</i> .
BTI	: Barisan Tani Indonesia.

<i>De facto</i>	: Berdasarkan fakta.
<i>Defisit</i>	: Kekurangan dalam kas keuangan/ anggaran belanja.
<i>Devide et impera</i>	: Politik pecah belah/ adu domba.
<i>Diplomasi</i>	: Kegiatan berunding/ bernegosiasi.
<i>Djawa Hokokai</i>	: Organisasi berbasis militer resmi yang berada langsung di bawah pengawasan Pendudukan Jepang.
<i>Domei</i>	: Kantor berita resmi Pemerintah Pendudukan Jepang.
<i>Emisi</i>	: Pengeluaran mata uang oleh bank sentral.
FDR	: Front Demokrasi Rakyat; partai politik.
<i>Federal</i>	: Pemerintahan sipil yang berkuasa atas beberapa negara bagian.
FKI	: Front Kemerdekaan Indonesia; organisasi tidak resmi yang mengurus keuangan negara.
<i>Florin/f</i>	: Satuan hitung mata uang, tetapi dalam kehidupan sehari-hari rakyat menggunakan perkataan rupiah dalam penyebutannya.
<i>Garis demarkasi</i>	: Batas pemisah daerah kekuasaan oleh pihak yang sedang bersengketa.
<i>Gerilya</i>	: Berperang dengan taktik/ siasat dan tidak terbuka.
<i>Gulden</i>	: Penyebutan mata uang Belanda.
<i>Gunseikanbu</i>	: Pemerintah militer pusat pada masa Pendudukan Jepang
<i>Hiperinflasi</i>	: <i>Inflasi</i> yang sangat tinggi.
<i>Inflasi</i>	: Kerosotan nilai mata uang disebabkan oleh laju peredaran uang yang sangat cepat.
<i>Internir</i>	: Tawanan perang.

<i>Isolasi</i>	: (Internasional) Tindakan yang dilakukan oleh Belanda untuk mengasingkan Indonesia dari politik Internasional.
<i>Jawatan</i>	: Bagian departemen atau pemerintah daerah yang mengurus suatu tugas atau pekerjaan yang luas cakupannya.
JPBI	: Jajasan Poesat Bank Indonesia.
<i>Kaonderan</i>	: Kecamatan.
<i>Kedaulatan</i>	: Kekuasaan hukum tertinggi atas pemerintahan suatu negara.
KMB	: Konferensi Meja Bundar.
KNIL	: <i>Koninklijke Nederlandsch Indische Leger</i> ; Tentara Kerajaan Hindia Belanda.
KNIP	: Komisi Nasional Indonesia Pusat.
<i>Kohir</i>	: Surat ketetapan pajak.
<i>Kolonialisme</i>	: Pendudukan suatu negara oleh negara lain/ penjajahan.
<i>Konfrontasi</i>	: Perang secara terbuka.
<i>Kopur</i>	: Komando tempur.
<i>Kup</i>	: Perebutan kekuasaan.
<i>Kurs</i>	: Nilai tukar mata uang.
<i>Korvet</i>	: Kapal perang.
KTN	: Komisi Tiga Negara.
<i>Likuidasi</i>	: Pembubaran perusahaan sebagai badan hukum.
<i>Ministerial</i>	: Kabinet yang dalam menjalankan kebijakan pemerintahan dipegang langsung oleh menteri masing-masing.
<i>Moneter</i>	: Perihal sistem ekonomi uang/ keuangan.

<i>Monopoli</i>	: Hak kuasa tunggal.
<i>Mosi</i>	: Keputusan suatu rapat penting.
<i>Muntbilyet</i>	: Uang yang dikeluarkan dan dijamin oleh pemerintah.
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia.
NICA	: <i>Nederlandsch Indie Civil Administratie</i> ; Pemerintahan Sipil Hindia-Belanda.
NIMEF	: <i>Nederlandsch Indie Metaalwaren en Emballage Fabrieken</i>
NIS	: Negara Indonesia Serikat.
<i>Obligasi</i>	: Surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang diperjualbelikan.
ORI	: Oeang Repoeblik Indonesia.
ORIBA	: Oeang Repoeblik Indonesia Banda Aceh.
ORIDA	: Oeang Repoeblik Indonesia Daerah.
ORIPS	: Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Sumatera.
ORITA	: Oeang Repoeblik Indonesia Tapanuli.
<i>Parlemerter</i>	: Kabinet yang menterinya diajukan oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen.
<i>Partikelir</i>	: Badan bukan milik pemerintah/ swasta.
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pepolit	: Pendidikan Politik Tentara.
Pesindo	: Pemuda Sosialis Indonesia; Partai politik.
PETA	: Pembela Tanah Air; organisasi militer bentukan Pemerintah Pendudukan Jepang.
PKI	: Partai Komunis Indonesia.

- Poetra : Poesat Tenaga Rakyat; Organisasi yang kemudian berubah menjadi *Djawa Hokokai*.
- Politionele Actie* : Sebutan untuk agresi militer yang dilakukan Belanda di Indonesia.
- PP : Persatuan Perjuangan; Partai politik.
- PPKI : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
- Presidensial* : Sistem pemerintahan dengan pelaksanaan tugas eksekutif dipimpin dan dipertanggungjawabkan oleh presiden, sedangkan presiden tidak tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen.
- Proklamasi* : Pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat.
- PS : Partai Sosialis; Partai Politik.
- PTT : *Post, Telegraph and Telephone*: Departemen resmi milik pemerintah.
- RAPWI : *Relief Association Prisoners of War Internees*; Komite mengurus orang-orang tawanan perang sekutu di Indonesia.
- Resolusi* : Putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat.
- Revolusi* : Perubahan ketatanegaraan, pemerintahan, atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan.
- RI : Republik Indonesia.
- RIS : Republik Indonesia Serikat.
- Romusha* : Kerja paksa pada masa Pendudukan Jepang.
- Sanering* : Tindakan pemerintah untuk menghilangkan kondisi mata uang tidak sehat yang beredar dalam masyarakat, dengan cara memperbaharui nilai mata uang atau menggantinya dengan mengeluarkan uang baru.

<i>Sekutu</i>	: Perang Dunia II; negara-negara yang berperang melawan blok Poros (Nazi Jerman, Italia, Jepang, Uni Soviet).
<i>Spekulan</i>	: Orang yang mencari keuntungan besar dengan cara melakukan spekulasi.
SOBSI	: Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia; Partai Politik.
<i>Status quo</i>	: Mempertahankan kekuasaan.
<i>Stuiver</i>	: Uang koin yang bernilai 5 sen atau 1/20 gulden. Uang logam ini pernah dipergunakan di Belanda dan jajahannya sebagai patokan nilai mata uang.
<i>Syomin Ginko</i>	: Bank perkreditan pertanian/ rakyat pada masa Pendudukan Jepang.
<i>Testamen politik</i>	: Wasiat penurunan jabatan.
TKR	: Tentara Keamanan rakyat.
TNI	: Tentara Nasional Indonesia.
TRI	: Tentara Republik Indonesia.
UNCI	: <i>United Nations Commission for Indonesia</i> ; Komisis jasa-jasa baik yang dibuat oleh PBB untuk Indonesia.
URI	: Uang Republik Indonesia; ejaan modern.
URISU	: Uang Republik Indonesia Sumatera Utara.
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar.
VOC	: <i>Verenigde Oost-Indische Compagnie</i> ; kongsi dagang Belanda di Indonesia.
<i>Zaimubu</i>	: Departemen Keuangan masa Pendudukan Jepang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebelum manusia mengenal pertukaran dan alat transaksi pembayaran, pada mulanya manusia berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri bergantung kepada apa yang tersedia di alam. Manusia hidup berkelompok-kelompok dan nomaden, berburu dan mencari buah-buahan untuk makan, dan menggunakan alat-alat yang ditemukannya dalam perburuan. Pada intinya apa yang disediakan oleh alam itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian setelah akal manusia berkembang dan telah hidup menetap, manusia mulai memproduksi alat pemenuh kebutuhan sendiri. Seperti membuat rumah, mulai berladang, berternak, membuat pakaian, dan alat-alat yang dipergunakan untuk kegiatannya sehari-hari dengan usaha mereka sendiri. Namun demikian, setelah dirasa bahwa apa yang diproduksi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan, saat itulah manusia mulai membutuhkan orang lain dan mulai dikenal sistem barter atau saling tukar barang untuk memperoleh apa yang sedang dibutuhkan yang dapat diperoleh dari orang lain.

Setelah sistem barter diterapkan dan kehidupan masyarakat lebih berkembang, terdapat kesulitan-kesulitan yang dirasakan. Kesulitan tersebut beberapa diantaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya, serta kesulitan untuk

memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya (Hasan, 2005: 23).

Pada sistem barter terdapat sebuah kondisi yang harus dipenuhi yang disebut kebetulan ganda. Kebetulan ganda pertama adalah bahwa seseorang harus menemukan orang lain yang akan menukarkan barangnya, dan kebetulan yang kedua adalah bahwa barang yang saling dipertukarkan itu adalah barang yang saling dibutuhkan. Dengan demikian, dalam sistem barter semua barang harus dapat diukur dengan seluruh atau sebagian barang lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dengan semakin kompleksnya kehidupan ekonomi suatu masyarakat, kebetulan ganda tersebut semakin sulit ditemukan. Kondisi yang demikian, menciptakan kebutuhan baru akan adanya alat penukar untuk mempermudah tukar-menukar atau perdagangan antar individu dan antar kelompok masyarakat (Solikin dan Suseno, 2002: 4).

Untuk mengatasinya mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang dapat diterima oleh umum. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Benda tersebut dapat berupa kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Proses ini terjadi secara bertahap dan berlangsung lama (Solikin dan Suseno, 2002: 5).

Meskipun alat tukar telah ada namun kesulitan-kesulitan pertukaran tetap ditemui. Kesulitan tersebut antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar

belum memiliki pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan, dan pengangkutan menjadi sulit dilakukan. Selain itu timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda yang digunakan sebagai alat tukar, seperti mudah hancur atau tidak tahan lama.

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam sebagai alat tukar. Logam berharga dianggap alat tukar yang pas karena memiliki sifat-sifat yang mencirikan sebagai suatu uang. Yaitu dapat dipecah-pecah dan dinyatakan dalam unit-unit kecil tanpa mengurangi nilai, mudah dibawa, tahan lama dan tidak mudah rusak.

Penggunaan logam mulia sebagai alat pembayaran ternyata mengalami pasang surut, antara lain sebagai akibat terbatasnya ketersediaan dan atau mahal biaya penambangan logam. Dalam perkembangan selanjutnya, selain emas dan perak juga digunakan bahan tembaga sebagai bahan pembuatan uang logam karena logam tersebut mudah didapat sehingga lebih murah harganya.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan perekonomian, penggunaan logam-logam menimbulkan permasalahan dalam sistem pembayaran, khususnya dalam transaksi yang berjumlah besar. Keadaan demikian selain menimbulkan kesulitan dalam masalah pengangkutan, resiko dirampok juga harus ditanggung oleh sang pemilik logam. Untuk mengatasi hal yang demikian, lembaga-lembaga swasta atau pemerintahan pada waktu itu mulai memberlakukan sertifikat-sertifikat jaminan berharga yang mewakili logam tersebut. Sertifikat jaminan ini dapat sewaktu-waktu ditukarkan secara penuh dengan jaminannya, sehingga seseorang tidak lagi

menggunakan emas secara langsung sebagai alat tukar. Sebagai gantinya sertifikat jaminan tersebutlah yang digunakan sebagai alat tukar.

Pada awal penggunaannya sertifikat jaminan didukung sepenuhnya oleh nilai logam yang disimpan ditempat penyimpanan. Setelah beberapa waktu digunakan dan diterima secara luas, sertifikat tersebut tidak bergantung secara penuh pada dukungan logam dengan nilai penuh. Misalnya hanya didukung 40% oleh simpanan emas. Dengan demikian, nilai yang tercantum pada sertifikat yang bersangkutan (nilai nominal) tidak sama dengan nilai jaminan fisik logam yang disimpan (nilai intrinsik). Apabila nilai nominal suatu mata uang lebih besar dibandingkan dengan nilai instriknya, uang tersebut dikenal dengan uang fiat. Dalam hal ini uang diakui sebagai tanda setuju. Termasuk diantaranya uang fiat adalah uang kertas yang kita kenal selama ini.

Uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan oleh umum sebagai alat bantu dalam pertukaran atau dapat dikatakan sebagai barang yang memiliki nilai di dalamnya (Waluya, 1993: 4). Adapun mata uang pertama yang dimiliki Indonesia setelah merdeka dikenal dengan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Pemberlakuan Uang ORI tidak hanya untuk membangun perekonomian semata, tetapi juga mempunyai manfaat politis di dalamnya.

Sejarah mata uang di Indonesia setelah kemerdekaan tidaklah tersusun secara sempurna. Namun terdapat beberapa hal yang dapat diketahui mempengaruhi perkembangannya. Sebelum Indonesia memproklamirkan kedaulatannya sebagai suatu negara yang merdeka, Bangsa Indonesia yang masih dikenal dengan sebutan

Hindia Belanda telah diduduki oleh Belanda selama kurang lebih 3,5 abad, dan kemudian dikuasai oleh Jepang selama 3,5 tahun.

Pada bulan Maret 1942 Jepang berhasil merebut Hindia Belanda dan memulai aksi bumi hangus. Objek-objek vital dihancurkan, yang sebagian besar terdiri atas aparat produksi. Akibatnya ialah, pada awal pendudukan Jepang hampir seluruh kehidupan ekonomi lumpuh. Kehidupan ekonomi kemudian sepenuhnya berubah dari keadaan normal menjadi ekonomi perang (Poesponegoro, 2010: 76).

Sejalan dengan perkembangan keamanan, Pemerintah Pendudukan Jepang mengambil alih semua kegiatan dan pengendalian ekonomi. Perekonomian di Indonesia didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing dan para pedagang etnis Cina. Sedangkan mobilisasi rakyat Indonesia sangat sempit, hanya dibatasi sebagai prajurit pekerja. Hal ini dapat dilihat ketika Jepang secara terbatas mempertahankan pengusahaan perkebunan kopi, teh, dan tembakau karena dirasa kurang berguna bagi usaha perang. Sedangkan sebagian besarnya, perkebunan ketiga jenis ini digantikan dengan tanaman penghasil bahan makanan dan tanaman jarak untuk pelumas. Selain itu, Jepang juga membentuk badan pengawas sebagai pemegang monopoli penjualan dan pembelian hasil perkebunan, dan rakyat juga diwajibkan menyerahkan sebagian hasil panennya.

Sejak awal masa pendudukan, Pemerintah Jepang mengerahkan kaum pemuda dan kaum pelajar dalam barisan-barisan semi militer. Mobilisasi lainnya dalam jumlah besar adalah *romusha* atau Jepang menyebutnya dengan prajurit pekerja. Pengerahan *romusha* merupakan eksploitasi pekerja kasar, terutama pemuda

untuk menunjang perang Jepang melawan sekutu yang menimbulkan banyak penderitaan termasuk korban jiwa. Banyaknya korban jiwa membuat Pemerintah Jepang bertindak lebih jauh lagi, sampai akhirnya hampir semua laki-laki yang tidak cacat diambil. Karena kaum tani yang dikerahkan, pengerahan tenaga *romusha* tersebut telah membawa akibat jauh pada struktur sosial di Indonesia (Poesponegoro, 2010: 60 – 67).

Sementara itu, pemerintah militer membanjiri Indonesia dengan mata uang pendudukan, yang mendorong meningkatnya inflasi terutama sejak tahun 1943 seterusnya. Pada pertengahan tahun 1945 mata uang ini bernilai sekitar 2,5 persen dari nominalnya. Pengerahan pangan dan tenaga kerja secara paksa bersama-sama dengan kekacauan umum mengakibatkan timbulnya kelaparan, terutama pada tahun 1944 dan 1945. Angka kematian meningkat dan kesuburan menurun; sepanjang yang diketahui, pendudukan Jepang adalah satu-satunya periode selama dua abad yang tidak berhasil meningkatkan jumlah penduduk secara berarti. Seperti wilayah-wilayah pendudukan lainnya, Indonesia menjadi suatu negeri yang tingkat penderitaan, inflasi, ketekoran, pencatutan, korupsi, pasar gelap, dan kematiannya adalah yang paling ekstrim (Ricklefs, 2007: 300).

Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, secara tidak langsung seluruh wilayah yang dahulunya dikuasai oleh Pendudukan Jepang beralih ke pihak sekutu, termasuk wilayah Indonesia. Disela waktu kekalahan Jepang oleh Sekutu dan penyerahan kembali kedaulatan Indonesia kepada pihak Belanda, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Menurut Ricklefs, masa ini merupakan

pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba (M.C Ricklefs, 2007: 317).

Setelah melewati beberapa perlawanan terhadap Jepang dan perdebatan di pihak tokoh bangsa sendiri, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Namun demikian, meskipun pada kenyataannya di wilayah Indonesia telah berdiri pemerintahan Republik Indonesia, Belanda tetap berkeyakinan bahwa wilayah tersebut masih berada dalam hak pemerintahan Hindia Belanda. Dengan berbagai cara Belanda berusaha keras untuk mewujudkan kembali kekuasaannya atas wilayah Indonesia. Sejak saat itu secara *de facto* telah terdapat dua pemerintahan di wilayah Indonesia, yaitu pemerintahan republik dengan pimpinan Soekarno-Hatta dan pemerintahan sipil Belanda NICA dengan pimpinan Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook.

Pada masa awal pembentukannya, kehidupan perekonomian Republik Indonesia belum teratur. Keadaan demikian disebabkan karena kondisi perekonomian Indonesia pasca kedaulatan masih dikuasai oleh asing. Masih beredarnya mata uang Jepang dan sisa dari pemerintahan Belanda, berdampak buruk pada perekonomian Indonesia dan menyebabkan terjadinya inflasi yang tinggi.

Menurut Poesponegoro (2010: 272-273), pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sebesar 4 milyar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja diperkirakan sebesar 1,6 milyar. Jumlah tersebut kemudian bertambah ketika pasukan sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di

Indonesia dan menguasai bank-bank. Dari bank-bank yang telah dikuasainya, sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk keperluan operasional mereka. Selain mata uang Jepang, uang dari sisa pemerintahan Hindia Belanda-pun masih tersimpan di *Javasche Bank*. Situasi keuangan Indonesia bertambah sulit karena pemerintahan Belanda juga memberlakukan blokade laut terhadap Indonesia.

Blokade laut yang dimulai pada bulan November 1945 ini, menutup pintu keluar-masuk perdagangan Republik Indonesia. Adapun alasan pemerintah Belanda melakukan blokade laut adalah :

- a. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
- b. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
- c. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang bukan Indonesia.

Blokade laut berdampak buruk pada kegiatan ekspor Republik Indonesia. Barang-barang dagang tidak dapat di ekspor, sehingga banyak barang-barang ekspor yang di bumi hanguskan. Selain itu Indonesia menjadi kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Akibat dari kondisi tersebut, kas negara menjadi kosong, pajak dan bea masuk sangat berkurang, sehingga pendapatan pemerintah semakin tidak sebanding dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Oleh karena dukungan petani inilah

pemerintah Republik Indonesia masih bertahan, sekali pun keadaan ekonomi sangat buruk.

Sementara itu pemerintah Indonesia belum bisa menghentikan peredaran mata uang Jepang dikarenakan Republik Indonesia belum memiliki mata uang sendiri sebagai penggantinya. Dampak dari keadaan tersebut memaksa pemerintah Republik Indonesia untuk sementara waktu menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu :

- a. Mata-uang *De Javasche Bank*;
- b. Mata-uang pemerintah Hindia Belanda;
- c. Mata-uang pendudukan Jepang.

Keadaan demikian berpengaruh pada dunia perekonomian Indonesia, termasuk dunia perbankan. Dalam periode 1945-1949 kegiatan perbankan telah berjalan dalam dua wilayah pemerintahan yang berbeda. Sementara bank-bank Belanda kembali berjalan di wilayah yang telah diduduki Belanda. Pemerintah RI juga mempunyai upayanya sendiri untuk membangun sistem perbankan nasional yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memprotes tindakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan

yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru.

Menanggapi sikap Belanda tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan yang berisi penolakan penggunaan uang NICA dan menyatakan bahwa uang NICA bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga pada bulan Oktober 1946 Pemerintah Republik Indonesia juga melakukan hal yang sama, dengan mencetak uang kertas Republik Indonesia pertama yang dikenal dengan Uang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang.

Uang ORI diberlakukan secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1946, sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1946 tentang pengeluaran uang ORI, dan ditarik kembali berdasarkan Maklumat Menteri Keuangan tanggal 1 Januari 1950, yang menyatakan bahwa uang ORI dan sejenisnya dinyatakan ditarik dari peredaran dan hilang sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah terhitung 1 Mei 1950. Pada tanggal 27 Maret 1950 telah dimulai realisasi penukaran uang ORI dengan uang baru keluaran dari *De Javasche Bank* (Rahardjo, 1995: 56).

Dapat dilihat bahwa penggunaan uang ORI sebagai alat pembayaran yang sah di daerah Republik hanya berlangsung 3 tahun 5 bulan. Meskipun Uang ORI dicetak dengan alat sederhana, yakni hanya menggunakan klise yang terbuat dari kayu, namun Uang ORI telah melambangkan kesatuan tekad bangsa dan dapat menjalin perasaan senasib dan sepejuangan. Selain itu, Uang ORI juga berfungsi dengan baik sebagai alat tukar yang memperoleh kepercayaan sepenuhnya dari rakyat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang pembuatan dan pemberlakuan Uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia), dan perkembangannya selama hampir empat tahun eksistensinya antara tahun 1946 – 1950, dalam penulisan tugas akhir skripsi yang penulis beri judul **“Sejarah Awal Pembuatan Uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) Dan Perkembangannya Sebagai Mata Uang Republik Indonesia Tahun 1946 – 1950”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang/ keadaan Republik Indonesia pada saat sebelum pemberlakuan Uang ORI tahun 1946 ?
2. Bagaimana proses pemberlakuan dan perkembangan Uang ORI tahun 1946 – 1950 ?
3. Apa pengaruh Uang ORI terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan politik bangsa Indonesia kala itu ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan berbagai masalah yang telah dijabarkan diatas, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui keadaan awal yang melatar belakangi pembuatan Uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) sebagai mata uang pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah

kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Penelitian juga dilakukan guna mengetahui bagaimana perkembangan Uang ORI sebagai suatu alat pembayaran yang sah masa awal kemerdekaan pada kurun waktu tahun 1946 – 1950, dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian tentang “Sejarah Awal Pembuatan Uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) dan Perkembangannya Sebagai Mata Uang Republik Indonesia Tahun 1946 – 1950” diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis :
 - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan Uang ORI (Oeang Repoeblik indonesia).
 - b. Bahan studi numimastika dan diharapkan dapat membantu memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan.
 - c. Penelitian yang lebih lanjut dan mendalam tentang perkembangan Uang ORI (Oeang Repoeblik indonesia) sehingga diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejarahan nasional.
2. Manfaat akademik :
 - a. Memberikan wawasan kepada pembaca untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah awal pembuatan Uang ORI (Uang Repoeblik

indonesia) dan perkembangannya sebagai mata uang Republik Indonesia tahun 1946 – 1950.

- b. Memberikan gambaran tentang perkembangan desain yang pernah terjadi pada Uang ORI (Oeang Repoeblik indonesia).

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam penulisan sejarah, bila disusun menjadi sebuah karya ilmiah sejarah memerlukan adanya pembatasan ruang lingkup yang akan diteliti oleh peneliti. Hal ini dikarenakan agar pembahasannya tidak terlalu meluas dan hasil dari penelitian tersebut terfokus terhadap satu bahasan masalah saja, namun di teliti secara mendalam. Ruang lingkup dalam penelitian ini akan dibahas dalam 2 lingkup penelitian yaitu lingkup waktu (*temporal scope*), dan lingkup wilayah (*spacial scope*).

Ruang lingkup waktu (*temporal scope*) yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini yaitu kurun waktu antara tahun 1946 – 1950, pada saat uang ORI berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia. Uang ORI diberlakukan secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1946, sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1946 tentang pengeluaran uang ORI, dan ditarik kembali berdasarkan Maklumat Menteri Keuangan tanggal 1 Januari 1950, yang menyatakan bahwa uang ORI dan sejenisnya dinyatakan ditarik dari peredaran dan hilang sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah terhitung 1 Mei 1950. Pada tanggal 27 Maret 1950

telah dimulai realisasi penukaran uang ORI dengan uang baru keluaran dari *De Javasche Bank* (Rahardjo, 1995: 56).

Untuk ruang lingkup spasial atau batasan wilayah, peneliti memilih lokasi penelitian tentang Uang ORI di Jawa. Pada saat itu di Indonesia terdapat berbagai jenis Uang ORI, yaitu Uang ORI yang beredar di Jawa, uang ORIPS di Sumatera, uang ORITA di Tapanuli, ORIPSU dan ORIBA di Aceh dan Sumatera Utara serta uang ORI lainnya yang dicetak di berbagai kabupaten dan pusat-pusat perjuangan. Dengan demikian, batasan spasial sangat diperlukan supaya bahasan mengenai Uang ORI lebih terperinci.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan penelitian mengenai topik bahasan ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa karya ilmiah yang ditemukan oleh peneliti mengenai Uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia), namun pokok bahasanya yang diambil berbeda dengan pokok bahasan yang peneliti akan lakukan.

Diantara peneliti yang telah melakukan penelitiannya mengenai Uang ORI (Oeang Repoeblik indonesia), yaitu Afrizal. Tesisnya dalam memperoleh gelar pascasarjana di UGM yang juga membahas mengenai Uang ORI (Oeang Repoeblik indonesia) ini berjudul *Perkembangan Desain Mata Uang Rupiah Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Pada Masa Pemerintahan Soekarno Periode 1945 – 1949*. Di dalamnya dibahas sedikit mengenai sejarah perkembangan Uang ORI (Oeang

Republik Indonesia) dan lebih mengfokuskan bahasannya mengenai perkembangan Uang ORI (Oeang Repoblik Indonesia) secara estetika/ keindahan. Menjelaskan mengenai ornamen-ornamen yang pernah berkembang sejalan dengan perkembangan desain Uang ORI (Oeang Repoblik Indonesia) pada periode tersebut, karena memang tesis ini diajukannya pada tahun 2013 untuk mendapat gelar pascasarjana pada bidang Seni Rupa.

Selain tesis tersebut, peneliti juga menggunakan sumber pustaka lain berupa buku, dimana buku tersebut memiliki topik yang relevan dengan topik penelitian yang akan diambil. Buku pertama yang penulis gunakan berjudul *Beberapa Soal Keuangan* yang ditulis oleh Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, dan diterbitkan pada tahun 1947. Buku ini berisi mengenai kedudukan uang terhadap perseorangan dan negara. Apa jasa uang terhadap masyarakat, dan bagaimana negara menerima pemasukan uang dari pemungutan pajak. Buku ini ditulis berlatar belakang kondisi Negara Indonesia yang baru saja merdeka. Di dalamnya menjelaskan mengenai masalah moneter yang sedang dihadapi oleh Indonesia pada masa itu, dan apa saja usaha-usaha yang dilakukan untuk menyehatkan kondisi keuangan Indonesia. Selain itu dibahas pula mengenai apa arti Indonesia terhadap Belanda diukur dengan keuangan, seperti seberapa besar Belanda menanamkan modalnya, berapa pendapatan yang diperoleh Belanda dari Indonesia.

Buku kedua yang peneliti gunakan berjudul *Duit, Munten*. Buku ini disusun oleh Hermanu guna diselenggarakannya sebuah pameran seni rupa numimastik pada tanggal 16 – 27 Januari 2009 di Yogyakarta. Di buku ini dibahas secara singkat

mengenai sejarah uang di Indonesia, seni rupa uang, dan menyuguhkan gambar-gambar beberapa uang kuno yang pernah berlaku di Indonesia. Selebihnya, berisi mengenai cerita-cerita pendek yang berkembang di masyarakat mengenai uang. Buku ini membantu peneliti dalam mengenal bentuk-bentuk uang yang pernah berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Uang ORI yang menjadi topik bahasan dari penelitian yang akan peneliti lakukan.

Buku ketiga yang peneliti gunakan yaitu buku yang berjudul *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia; Jilid I (1945 – 1958)*. Penulisan buku ini bersumber pada penugasan oleh Direksi Bank Indonesia kepada suatu panitia yang di ketuai oleh Drs. Oey Beng To sewaktu menjabat menjadi Gubernur Bank tersebut. Jilid pertama ini meliputi masa 1945 – 1958 dan mengambil proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai awal peninjauan, dan dibagi menjadi 3 subperiode. Masing-masing periode meliputi jangka waktu 1945 – 1949, 1950 – 1953, 1954 – 1958. Dari setiap subperiode disinggung secara sepintas peristiwa-peristiwa penting mengenai perkembangan di bidang politik, selanjutnya dibahas secara mendalam perkembangan di sektor produksi, perkembangan moneter dalam negeri (meliputi peredaran uang, keuangan negara dan anggaran belanja, perkreditan serta laju inflasi) dan akhirnya perkembangan neraca pembayaran (termasuk pokok-pokok rezim dan kebijakan devisa, posisi devisa serta hubungan dengan luar negeri). Selain mengenai ekonomi-moneter sebagai pokok bahasan utama, pada sub periode terkait dibahas pula ulasan terpisah mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah di bidang ekonomi moneter.

Buku tersebut sangat membantu peneliti dalam memahami situasi ekonomi, dan kondisi politik dan sosial masyarakat Indonesia pada saat Uang ORI dikeluarkan. Selain itu, buku ini juga membantu peneliti dalam mengetahui bagaimana proses Uang ORI diciptakan, mulai dari latar belakang pembuatan, perencanaan dan pembuatan Uang ORI, hingga akhirnya Uang ORI beredar.

Buku Selanjutnya yang penulis gunakan adalah buku yang berjudul *Sejarah Nasional Indonesia VI Edisi Pemutakhiran* hasil karya M.D Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, dan *Sejarah Indonesia Modern* karya M.C Ricklefs. Kedua buku tersebut membahas secara kronologis garis besar peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Bahasannya mencakup dari kedatangan Agama Islam di Indonesia hingga pasca Kemerdekaan Republik dalam buku *Sejarah Indonesia Modern*, sedangkan pada buku *Sejarah Nasional Indonesia VI Edisi Pemutakhiran* lebih terfokus pada Masa Kependudukan Jepang hingga Kemerdekaan Republik. Kedua buku tersebut membantu penulis dalam memahami secara lebih dalam, mengenai kondisi masyarakat dan situasi politik yang berkembang di Indonesia pada kurun waktu sebelum dan sesudah beredarnya Uang ORI.

Buku keenam yang penulis gunakan adalah sebuah disertasi karya George McTurnant Kahin untuk studinya di Cornell University, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi buku yang berjudul *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Buku ini membahas secara komprehensif dan terperinci mengenai awal mula timbulnya nasionalisme dan sejarah pergerakan nasional di Indonesia, hingga

terbentuknya Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950. Buku ini sangat membantu peneliti bilamana kurang pemahaman dari dua buku sebelumnya.

Selain itu peneliti juga menggunakan buku karya dari Pahlawan Nasional Indonesia, DR. A. H. Nasution yang berjudul *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* sebagai perbandingan. Buku ini terdiri dari 11 jilid buku. Masing-masing jilid membahas secara terperinci pokok bahasan yang berbeda, yaitu : Jilid 1 “Proklamasi”, jilid 2 “Bergelut Cara: Diplomasi atau Bertempur”, jilid 3 “Diplomasi sambil Bertempur”, jilid 4 “Periode Linggarjati”, jilid 5 “Agresi Militer Kolonial Belanda I”, jilid 6 “Perang Gerilya Semesta I”, Jilid 7 “Periode Renville”, Jilid 8 “Pemberontakan PKI 1948”, jilid 9 “Agresi Militer Kolonial Belanda II”, jilid 10 “Perang Gerilya Semesta II”, “dan jilid 11 “Periode KMB.

Buku kedelapan yang penulis gunakan yaitu buku yang berjudul *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Buku ini disusun oleh sejarawan Indonesia R.Z. Leirissa, dkk yang dibuat untuk Departement Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Jakarta. Buku ini membahas tentang sejarah perekonomian Indonesia dari masa prasejarah hingga masa Repelita IV, yang dibagi menjadi 4 Bab tersusun. Bab pertama membahas Nusantara pra emporium, bab kedua membahas mengenai Nusantara dalam kurun niaga, bab ketiga membahas Nusantara pada cengkeraman kolonialisme, dan bab keempat membahas mengenai Nusantara menuju kemakmuran yang dimuali dengan perekonomian Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. Buku ini membantu penulis dalam memahami garis besar sejarah perekonomian Indonesia.

Buku kesembilan yang peneliti gunakan, yaitu buku yang dieditori oleh Hadi Soesastro dkk yang berjudul *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir Jilid 1 1945 – 1959: Membangun Ekonomi Nasional*. Buku ini merupakan kumpulan tulisan penulis-penulis Indonesia, yang telah memberikan pemikiran mengenai ekonomi Indonesia, dan menyoroti berbagai segi perkembangannya sejak Kemerdekaan. Didalamnya berisi 8 bagian pembahasan dengan jumlah 29 buah artikel secara keseluruhannya. Buku ini membantu peneliti dalam memperoleh gambaran lebih jauh mengenai situasi ekonomi yang berkembang dalam kurun waktu yang telah disebutkan.

Beberapa literatur yang dihimpun, dapat menjadi sebuah gambaran untuk mengetahui teori/landasan dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain sumber-sumber pustaka yang telah disebutkan, peneliti masih menambah sumber pustaka yang relevan selama penelitian dilakukan.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1975: 32). Dengan penelitian yang akan dilaksanakan berdasarkan metode tersebut diharapkan dapat menghasilkan penulisan ilmiah dengan suatu kegiatan yang obyektif, sistematis, dan logis.

Penulisan skripsi yang akan disusun menggunakan pendekatan secara historis dan uraiannya bersifat deskriptif analitis ini, bertujuan untuk merekonstruksi masa

lampau secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, verifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat (Suryabrata, 1998: 6).

Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik

Heuristik menurut terminologinya dari bahasa Yunani *Heuristikum* yaitu mengumpulkan atau menemukan sumber. Sumber atau sumber sejarah yang dimaksud disini adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan terdifersifikasi. Catatan, tradisi lisan, runtuan atau bekas-bekas bangunan prehistori, inskripsi kuno, adalah sumber sejarah. Setiap titik cerah apapun yang memberi penerangan bagi cerita kehidupan manusia dikategorikan sebagai sumber sejarah. Tinggalan kehidupan manusia dan hasil manusia yang dikomunikasikan juga dapat dikategorikan sebagai sumber sejarah (Suhartono, 2010: 30).

Bentuk pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berita-berita surat kabar sejaman, arsip-arsip yang berisi ketetapan dan maklumat di bidang ekonomi, dan undang-undang yang mengatur pemberlakuan dan penarikan Uang ORI. Data sekunder dapat diperoleh dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti jurnal, artikel majalah, karya ilmiah, dan buku-buku yang membahas maupun

yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan. Heuristik dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan untuk memperoleh data dengan cara mencari literatur-literatur yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sumber-sumber tertulis yang digunakan oleh penulis adalah arsip-arsip yang terkait dan berita surat kabar sejaman, serta buku yang topiknya relevan dengan permasalahan yang diambil. Metode kepustakaan dilakukan untuk mencari sumber yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian penulis. Penulis mendapatkan sumber-sumber primer dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Perpustakaan Nasional, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, Hatta Corner Perpustakaan Universitas Gajah Mada dan Jogja Library Center. Sedangkan Sumber sekunder penulis dapatkan dari Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Nasional, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, Jogja Library Center, dan Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang.

b. Studi Lapangan (Observasi)

Studi lapangan atau observasi yang dimaksud adalah kegiatan melakukan pengamatan secara langsung untuk menghimpun jejak sejarah

terhadap perkembangan Uang ORI tahun 1946 – 1950. Teknik yang akan dilakukan adalah mengamati langsung tempat-tempat yang berhubungan dengan Uang ORI. Observasi langsung yang dilakukan peneliti adalah dengan mencari berbagai surat kabar sejaman sebagai sumber primer dari penelitian yang akan dilakukan, dan melihat langsung bentuk Uang ORI yang berada di Museum Bank Indonesia.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber adalah penilaian atau tahap pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan dilihat dari sudut pandang nilai kebenaran. Pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan meninjau kembali apakah sumber yang digunakan sesuai atau tidak, sumber asli atau sumber turunan. Kritik sumber ini juga merupakan usaha untuk mendapatkan data yang tingkat kebenarannya atau kredibilitasnya paling tinggi, dengan melakukan seleksi data yang terkumpul. Kritik sumber ini dibedakan menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

- a. Kritik ekstern atau uji otentisitas sumber, merupakan penilaian sumber dari aspek fisik dari sumber tersebut. Kritik ini lebih dahulu dilakukan sebelum kritik intern yang lebih menekankan pada isi sebuah dokumen. Pada tahap ini peneliti melakukan kritik dengan menyoroti penggunaan bahasa dan ejaan dari sumber-sumber dokumen yang telah diperoleh sebelumnya. Tatanan bahasa dan ejaan yang digunakan pada kurun waktu yang diambil memiliki ciri yang khas, seperti

penggunaan “dj” untuk pelafalan “j” dan “oe” untuk pelafalan “u”. Kritik juga dilakukan dengan melihat jenis kertas dan font tulisan yang digunakan, karena pada kurun waktu yang diambil pembuatan dokumen-dokumen masih menggunakan mesin ketik dan kualitas kertas yang digunakan juga tidak terlalu bagus. Selain itu kritik ekstern juga menyoroti kapan dokumen itu dibuat, dan siapa yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut, dilihat dari siapa yang menandatangani.

- b. Kritik intern atau verifikasi kredibilitas sumber ditujukan untuk mengetahui kredibilitas (kesahihan) dari sumber sejarah. Dengan kata lain, kritik intern harus membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber itu memang dapat dipercaya. Penilaian intrinsik sumber dimulai dengan mencocokkan fakta dari sumber satu dengan sumber lainnya, dan apakah sumber tersebut memiliki kecocokan dengan kajian penelitian atau tidak. Cara yang dilakukan dalam melakukan kritik intern sumber adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan hipotesa interogatif. Selain itu kritik intern juga dilakukan dengan jalan menyoroti pengarang daripada sumber tersebut, apakah kredibilitasnya bisa dipercaya dan sebagai apa pengarang tersebut berpengaruh dalam kurun waktu yang diambil. Setelah mendapat kesaksian dari pelbagai sumber, langkah selanjutnya adalah membandingkannya. Selanjutnya sumber sejarah yang telah

mengalami kritik sejarah melahirkan fakta sejarah. Dengan demikian peneliti akan mengambil fakta sejarah yang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan sehingga diperoleh sumber yang relevan.

3. Interpretasi

Menurut Notosusanto (1971: 230) interpretasi adalah menentukan makna hubungan dari fakta-fakta dan data yang diperoleh. Berbagai fakta lepas yang penulis peroleh dari berita-berita surat kabar sejaman, satu sama lain dirangkaikan dan peristiwa yang satu dengan yang lain dimasukkan di dalam keseluruhan konteks peristiwa-peristiwa lain yang melingkupinya.

Menurut Subagyo (2010:109-110) kedalam proses interpretasi ini termasuk pula periodisasi sejarah. Fakta-fakta sejarah yang saling berpengaruh dirangkai dan disusun sesuai periodisasi, sehingga menjadi suatu *storyboard* yang berangkaian antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Proses menafsirkan fakta-fakta sejarah serta proses penyusunannya menjadi suatu kisah sejarah yang integral menyangkut proses seleksi sejarah. Pada proses ini tidak semua berita/sumber yang diperoleh dapat digunakan, namun hanya berita/sumber yang relevan dengan topik penelitian saja yang akan disusun. Pelbagai fakta yang lepas satu sama lain tersebut dirangkai dan dihubung-hubungkan hingga menjadi kesatuan fakta yang membentuk cerita sebuah peristiwa.

4. Historiografi

Tahap terakhir dari metode sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini peneliti akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai sejarah awal pembuatan Uang ORI (Uang Republik Indonesia) dan perkembangannya sebagai mata uang Republik Indonesia tahun 1946 – 1950 dalam bentuk data deskriptif, berupa kata-kata tertulis secara kronologis dan sistematis dengan menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca.

H. LANDASAN TEORI DAN PENDEKATAN

Penulisan skripsi ini membahas mengenai keadaan Indonesia sekitar pemberlakuan Uang ORI, proses pemberlakuan Uang ORI, dan pengaruh Uang ORI dalam kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Keadaan Indonesia sekitar pemberlakuan Uang ORI dalam konteks politik, sosial dan ekonomi memerlukan teori dan metodologi dalam menuliskannya, untuk mengetahui faktor-faktor kausal, kondisional dan determinan-determinan dari suatu peristiwa sejarah, yang dibutuhkan dalam historiografi yang deskriptif analitis.

Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa penulisan skripsi ini termasuk dalam penulisan sejarah sosial-ekonomi. Menurut Kuntowijoyo, sejarah dari sebuah unit masyarakat dengan ruang lingkup dan waktu yang tertentu dapat digolongkan dalam sejarah sosial. Sejarah sosial memiliki bahan garapan yang luas.

Kebanyakan sejarah sosial juga mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah ekonomi, sehingga menjadi sejarah sosial-ekonomi (Kuntowijoyo, 2003: 39). Selain hal tersebut Kuntowijoyo juga menekankan bahwa gejala ekonomi tidak terlepas dengan gejala politik yang sama-sama merupakan suatu produk dari interaksi timbal balik kekuatan-kekuatan yang berpengaruh (Kuntowijoyo, 2003: 111).

Permasalahan inti dalam teori dan metodologi yang digunakan pada sebuah historiografi adalah suatu pendekatan yang digunakan sebagai bantuan dalam menganalisis suatu kejadian. Pendekatan yang dimaksud adalah tentang bagaimana peneliti memandang suatu permasalahan atau kejadian dalam suatu penulisan historiografi. Penulisan skripsi ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan politik, pendekatan ekonomi, dan pendekatan sosial.

Menurut Sartono Kartodirdjo, pendekatan politik adalah pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hirarki sosial, pertentangan kekuasaan, dan lain sebagainya (Kartodirdjo, 1992:4). Pendekatan politik digunakan penulis untuk memahami keadaan politik Indonesia, baik mengenai pertentangan antara pihak intern Bangsa Indonesia, maupun dengan pihak Belanda. Meskipun demikian, hal yang lebih ditekankan dalam penulisan skripsi ini adalah pada proses diplomasi yang dilakukan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Penetapan kebijakan-kebijakan politik ekonomi pada masa itu diambil dengan penuh perhitungan, karena pada masa Uang ORI berlaku, di Indonesia terdapat dua kekuasaan dalam satu wilayah kedaulatan, yaitu daerah kekuasaan NICA yang

dibawah Pemerintahan Belanda dan daerah kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia.

Untuk penelitian sejarah, pendekatan terhadap tahapan ekonomi tidak perlu harus menggunakan ukuran-ukuran ekonomi, melainkan hanya sebatas pada tahapan pertumbuhan ekonomi (Kuntowijoyo, 2003: 99). Pendekatan ekonomi merupakan penjabaran dari konsep-konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi, dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial. Pendekatan ekonomi memiliki kaitan antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pemegang kedudukan yang menjalankan roda perekonomian.

Pendekatan ekonomi dilakukan oleh penulis sebagai cara untuk memahami kondisi ekonomi moneter Republik Indonesia, dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil kala Republik Indonesia baru saja merdeka. Salah satu kebijakan moneter Republik Indonesia kala itu untuk mengurangi masalah inflasi adalah dengan menciptakan mata uang sendiri, yaitu Uang Republik Indonesia. Pendekatan ekonomi ini juga penting untuk mendukung analisa penulis tentang pengaruh Uang ORI dalam bidang sosial-ekonomi masyarakat Indonesia sebelum dan setelah Uang ORI diciptakan, dan dalam alokasi dan pendistribusiannya keseluruh wilayah kekuasaan Republik Indonesia di Jawa.

Pendekatan sosiologis melihat segi-segi sosial peristiwa yang dibahas, seperti konflik antar golongan berdasarkan kepentingan ideologis dan lainnya. Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan sosiologis digunakan penulis untuk melihat respon sosial terhadap kejadian-kejadian sebelum dan setelah pemberlakuan Uang ORI, dan

bagaimana penerimaan bangsa Indonesia terhadap Uang ORI. Selain itu pendekatan sosial juga digunakan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Indonesia beardaptasi terhadap pemberlakuan Uang ORI, serta dampak-dampak sosial apa yang timbul akibat pemberlakuan Uang ORI.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara keseluruhan dalam penulisan “Sejarah Awal Pembuatan Uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) dan Perkembangannya Sebagai Mata Uang Republik Indonesia Tahun 1946 – 1950”, penulis menjabarkannya menjadi 5 bab yang tersusun. Pembahasan tiap bab menitik beratkan pada penjelasan masalah tertentu. Meskipun begitu, hubungan antara satu bab dengan yang lain sangat berkaitan, sehingga menjadi sebuah hasil pemikiran yang utuh dan menyeluruh.

Bab satu adalah berupa pendahuluan. Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas mengenai kondisi atau situasi Bangsa Indonesia, sebelum dan ketika keluarnya kebijakan pemerintah untuk membuat dan memberlakukan Uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) sebagai mata uang Republik Indonesia mulai tahun 1946. Situasi yang dimaksud adalah mengenai penggunaan uang di wilayah Indonesia sebelum berlakunya Uang ORI, dan kejadian-kejadian penting di bidang politik yang terjadi pada masa sebelum dan saat Uang ORI diberlakukan.

Selain itu, bab dua juga membahas mengenai usaha-usaha pemerintah dalam menstabilkan kondisi keuangan dalam rangka persiapan pemberlakuan Uang ORI. Perang kemerdekaan yang terus berkecamuk belum memungkinkan pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan kebijakan moneter yang terencana secara sistematis untuk menunjang tercapainya stabilitas harga. Kebijakan yang ditempuh pada waktu itu lebih banyak ditekankan pada pemenuhan kebutuhan uang kartal baik untuk membiayai defisit keuangan negara maupun untuk kebutuhan transaksi. Pada periode ini pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan beberapa ketetapan-ketetapan pada bidang ekonomi yang mengatur peredaran uang kartal sebagai langkah untuk mengurangi tekanan inflatoir akibat peredaran uang yang berlebihan.

Bab tiga membahas mengenai pemberlakuan Uang ORI. Bab ini berisikan proses pembuatan Uang ORI dari mulai pengusulan, persiapan percetakan, persebaran, hingga Uang ORI ditarik kembali pada tahun 1946; serta dampak beredarnya uang ORI dalam perekonomian Indonesia sesaat setelah uang ORI diedarkan

Bab empat membahas mengenai pengaruh uang ORI dalam bidang politik dan sosial ekonomi Indonesia, sehingga dapat dikatakan uang ORI sebagai lambang negara merdeka, alat perjuangan revolusi, dan alat pembayaran bagi negara yang baru saja merdeka.

Bab lima adalah penutup. Dimana dalam bab ini berisikan mengenai simpulan dari pembahasan topik yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya disertai dengan lampiran-lampiran yang menguatkan fakta hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II
KONDISI REPUBLIK INDONESIA
PADA SAAT PEMBERLAKUAN UANG ORI

A. Bentuk Penggunaan Uang Sebelum Pemberlakuan Uang ORI

Tidak diketahui pasti sejak kapan masyarakat Indonesia mengenal penggunaan uang sebagai alat penukar. Namun diperkirakan sejak abad ke 7 di beberapa wilayah Indonesia telah mengenal penggunaan uang sebagai alat penukar dalam perdagangan. Perkiraan ini berdasarkan bukti-bukti penemuan arkeologi, bahwa di Jawa ditemukan sejumlah mata uang perak yang menunjukkan angka tahun 647 Masehi dan mata uang Krisnala yang terbuat dari emas peninggalan kerajaan Kediri (Karim, 1979: 1-2).

Disamping mata uang-mata uang tersebut di atas, ditemukan pula barang yang dipergunakan sebagai alat penukar atau uang barang, misalnya: manik-manik dari Bengkulu dan Pekalongan, gelang dari Majalengka dan Sulawesi Selatan, Belincung dari Bekasi, moko dari Nusa Tenggara Timur, serta kapak dan uang kerang dari Irian Jaya (Karim, 1979: 3-5).

Sampai kemudian masuknya pendatang-pendatang dari Eropa dalam abad 16, terutama yang mempunyai tujuan ekonomi menambah keanekaragaman jenis uang yang beredar di Indonesia, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Keanekaragaman jenis uang tersebut tidak menghambat sistem perdagangan, karena pada masa itu masih berlaku mata uang penuh. Mata uang penuh adalah mata uang

yang nilai materinya sama dengan nilai yang tertulis di dalam mata uang tersebut. Sebagai mata uang standar yang digunakan adalah mata uang *Real Spanyol*, yang disebut juga *Spaansche Matten*, *Mat* atau *Plasters*. Bangsa Timur sangat menyukai mata uang ini, karena kadar perakunya yang tinggi. Oleh karena itu para pedagang dari Eropa kemudian banyak yang membawa dan memasukkan *Real Spanyol* ini ke Indonesia. Pada masa ini peredaran uang masih terbatas di masyarakat kalangan atas, dan sistem barter juga masih tampak dalam perdagangan Internasional (Kristianiarsi, 1987: 13).

1. Penggunaan Uang Pada Masa Hindia Belanda

Persaingan dagang yang semakin tajam dikalangan pedagang-pedagang asing untuk memperoleh barang-barang dari Indonesia, menimbulkan minat para pedagang Belanda untuk mendirikan kongsi dagang bersama. Pada tahun 1602 terbentuklah gabungan kongsi-kongsi dagang yang berlayar ke Indonesia dengan nama *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). VOC mengajukan permohonan kepada pemerintah Belanda agar diberi kekuasaan untuk mencetak mata uang *real* baru untuk menggantikan *real Spanyol*, yang sama besar, berat, dan kadarnya dengan *real Spanyol*, karena lama-kelamaan timbul kesulitan bagi para pedagang untuk mendapatkan mata uang *real Spanyol* di peredaran. Permohonan ini disetujui dan akhirnya VOC mencetak mata uang baru, yaitu *Rijksdaalder* (mata uang perak Belanda) dengan nilai tukar yang dinyatakan dengan *Stuiver*. *Rijksdaalder* mulai

diedarkan pada tahun 1622, kemudian diikuti mata uang lainnya seperti, *Leeuwendaalder* dan *Kruisrijksdaalder* (Kristianiarsi, 1987: 14).

Kebutuhan akan perak yang semakin besar dalam perdagangan di Indonesia, menjadikan VOC melakukan penaikan nilai mata uang Belanda tanpa persetujuan pemerintahan pusat. Misalnya *Kruisrijksdaalder* di Belanda mempunyai nilai 50 *Stuiver*, sedangkan di Indonesia nilainya dinaikkan menjadi 60 *Stuiver*. VOC juga melakukan pencetakan mata uang perak sendiri, sejak tahun 1640 di Batavia. Walaupun kemudian tindakan VOC menaikkan nilai dan mencetak mata uang diketahui oleh pemerintah Belanda; dan diambil tindakan dengan dikeluarkannya peraturan mengenai mata uang yang boleh beredar lengkap dengan nilai tukarnya dan larangan mencetak mata uang sendiri. Peringatan tersebut hanya ditaati pada saat permulaan dikeluarkan dan untuk selanjutnya VOC kembali bertindak sendiri. Hal ini berulang kali terjadi sampai masa kolonialisme VOC berakhir (Kristianiarsi, 1987: 15).

Hal serupa juga terjadi dalam peredaran mata uang pecahan kecil (uang receh). *Cassie* (Kepeng) merupakan mata uang yang dibuat dari tembaga dan berasal dari Cina, dan digunakan pada perdagangan yang tetap bertahan sampai akhir abad ke 18. VOC pada mulanya juga ingin menyingkirkan mata uang ini dengan memasukkan mata uang tembaga dari Belanda, seperti *Schellingen* dan *Stoters*, tetapi tidak berhasil. Bahkan akhirnya Gubernur Jenderal VOC *Hendrick Brouwer*, memberikan hak istimewa kepada orang-orang Cina di Batavia untuk membuat *Cassie* pada tahun 1633. VOC meminta bantuan pemerintah Belanda untuk mengirim mata uang receh,

dan pada tahun 1727 diedarkanlah mata uang tembaga Belanda, yaitu *Duit*. Lama kelamaan *Duit* dapat diterima, bahkan sampai abad ke 20 masih digunakan sebagai alat tukar di beberapa daerah (Kristaniarsi, 1987: 16).

VOC selain memasukkan dan mengedarkan mata uang Belanda, juga memperkenalkan penggunaan uang kertas di Indonesia. Sejarah uang kertas di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal *Van Imhoff* tahun 1748. Uang kertas tersebut belum berbentuk uang tunai, tetapi merupakan kertas-kertas berharga (sertifikat) dan memperoleh bunga bila akan ditukar dengan uang tunai. Sertifikat ini dapat beredar sebagai uang dan keberadaannya sangat disukai oleh masyarakat, karena nilainya lebih tinggi dari uang tunai. Dan sejak tahun 1783, VOC mulai mengedarkan uang kertas dengan jaminan perak 100% (Kristaniarsi, 1987: 17).

Menurut fakta yang ditemukan penulis ketika penelitian, sertifikat masih tetap dikeluarkan selama masa pemerintahan Hindia Belanda masih berkuasa di Indonesia. Sertifikat ini dikeluarkan oleh *Javasche Bank*, yang merupakan bank swasta yang didirikan pada tanggal 11 Desember 1827. Dalam mengatur keuangan negara yang tidak teratur, pemerintah Hindia Belanda bekerja sama dengan bank tersebut. Namun hak paten yang dimiliki *Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi tidak memberi wewenang kepadanya untuk mengatur uang yang beredar. Karena wewenang tersebut ada pada pemerintahan Hindia Belanda, begitu pula dalam pengangkatan Presiden Direktur dan Sekretariannya. Sertifikat ini dikeluarkan dengan adanya jaminan uang standar perak ataupun tembaga yang disimpan di dalam bank sirkulasi. Perlu pula

diketahui bahwa selain beragam mata uang perak dan tembaga yang berasal dari berbagai negara, pada masa itu juga beredar mata uang emas, seperti dari Aceh, Inggris, Belanda dan Venesia. Mata uang-mata uang ini beredar tanpa tatanan yang teratur, tetapi berlaku bersama-sama dalam peredaran, tergantung dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi perdagangan.

Pada masa kolonialisme Inggris di Indonesia, di bawah pimpinan Letnan Gubernur Raffles (1811 – 1816), pada tahun 1813 mata uang standar perak kemudian diganti kedudukannya dengan *Ropij Jawa* yang dicetak di Surabaya. Mata uang ini terbuat dari emas dan perak, berbentuk bundar pipih. Mata uang yang terbuat dari emas dan perak tersebut disebut juga uang *Rupee*, yang kemudian di-Arabkan menjadi *Roepyah* (Karim, 1979: 13).

Setelah Indonesia dikembalikan kepada pemerintahan Belanda, kedudukan *Ropij Jawa* sebagai mata uang standar diganti dengan *Gulden Hindia Belanda* yang dicetak di Batavia, pada tahun 1817. Mata uang Hindia Belanda dihitung dengan $f =$ florin atau gulden, tetapi dalam kehidupan sehari-hari rakyat menggunakan perkataan rupiah atau perak dalam penyebutannya (Kristaniarsi, 1987: 21).

Ketika mengalami krisis keuangan akibat perlawanan dari bangsa Indonesia, VOC memberlakukan uang *Bonk*. Uang *Bonk* terbuat dari potongan-potongan pecahan meriam, yang dikeluarkan hingga tahun 1818. Uang inilah yang digunakan untuk mengisi kas VOC yang terus mengalami krisis. Uang *Bonk* ini terbuat dari tembaga, berbentuk setengah potongan balok (Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Timur, 1981:7).

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibawah pimpinan Gubernur Jenderal *Rochussen* yang mulai menjabat pada akhir tahun 1845, ia mengadakan pembaharuan sistem keuangan dengan dikeluarkannya uang pemerintah yang baru, yaitu *Recepis*. *Recepis* merupakan uang kertas darurat yang dicetak oleh pemerintah dan mempunyai nilai nominal 1 *gulden*, 5 *gulden*, 10 *gulden*, 25 *gulden*, 100 *gulden* dan 500 *gulden*. Standar kurs *Recepis* terhadap *Duit* juga sama dengan *gulden* perak, yaitu 1:120. Pada waktu yang sama dikeluarkan pula peraturan untuk menarik *Duit* dari peredaran dan menukarnya dengan *Recepis*. Sertifikat-sertifikat *Javasche Bank* pun dapat ditukar dengan *Recepis* dan tidak lagi dengan perak (Kristaniarsi, 1987: 23).

Dengan demikian segera sejumlah besar *Duit* dan sertifikat-sertifikat berdasarkan jaminan tembaga ditarik keluar dari peredaran. Diadakan pula larangan impor yang ketat untuk mencegah masuknya tembaga baru. Sejak saat itu kembali mata uang tembaga menduduki peranannya sebagai uang kecil. Kedudukan *Duit* diganti dengan *Sen* pada tahun 1861. Untuk menggantikan kedudukan *Recepis* yang merupakan uang darurat, sejak tahun 1855 *Javasche Bank* diberikan hak untuk mengeluarkan uang kertas bank tetapi harus 100% dijamin dengan emas. Pada tahun 1875 jaminan diubah menjadi sistem proporsional, yaitu uang kertas yang diedarkan harus 40% dijamin dengan emas (Kristaniarsi, 1987: 24).

2. Penggunaan Uang Pada Masa Pendudukan Jepang

Berbeda dengan zaman Hindia Belanda dimana segala kekuasaan berada di tangan Gubernur Jenderal, pada masa Pendudukan Jepang kekuasaan dipegang oleh Panglima Tentara. Sesuai dengan kebijakan pemerintahan militer Jepang untuk tetap menggunakan aparat pemerintahan sipil yang lama beserta pegawainya, maka *Zaimubu* (Departemen Keuangan) dibentuk dengan membuka kembali Departemen Keuangan yang telah ada sejak jaman Hindia Belanda. Namun semua kekuasaan dan kebijakan keuangan ditetapkan oleh *Gunseikanbu* (Pemerintah Militer Pusat), sedangkan *Zaimubu* dan jawatan-jawatannya hanya merupakan unit administratif saja.

Untuk menjaga stabilitas sirkulasi uang dan juga untuk kepentingan pengeluaran biaya pemerintahan, pemerintah tentara Jepang mengeluarkan uang kertas militer *Nanpo Kaihatsu Kinko*. Selain itu dikeluarkan pula Undang-Undang No. 2 Th. 1942 pasal 8 sampai dengan pasal 13 pada tanggal 20 Maret 1942, sebagai tindak lanjut mengatasi masalah keuangan. Undang-Undang tersebut menetapkan:

TENTANG KEOEANGAN

- Pasal 8: Dilarang keras berboeat sesoeatoe jang dapat nimimboelkan kekatjauan dalam perekonomian dan keoeangan, misalnja: membawa lari, membakar atau menjemboenjikan harta benda seperti oeng emas dan perak, soerat-soerat jang berharga, boekoe-boekoe dan sebagainya jang dipegang oleh bank-bank atau badan-badan lain jang bersangkoetan dengan peredaran oeng.
- Pasal 9: Sementara waktoe pekerdjaan bank-bank diperhatikan. Maka sekalian koeasa dari bank-bank haroes menghadap selekas-lekasnja kekantor pemerintah Balatentara oentok menerima keterangan dan menoenngoe perintahnja boeat mengerdjakan lagi.

- Pasal 10: Sementara waktu dilarang keras memindahkan ketangan lain harta benda yang berharga orang, orang simpanan di bank dan sebagainya, dengan tidak mendapat izin lebih dahulu dari Balatentara Nippon.

TENTANG ORANG KERTAS DAN ORANG KETJIL

- Pasal 11: Diseluruh daerah yang telah diduduki Balatentara Nippon, orang kertas militer dan orang rupiah harus digunakannya sebagai orang yang sah. Matjam orang kertas militer ditetapkan ada 7 (tujuh) rupa: yaitu f. 10,- (sepuluh rupiah), f. 5,- (lima rupiah), f. 1,- (satu rupiah), 50 sen, 10 sen dan 1 sen.
- Pasal 12: Dilarang keras memakai orang lain dari pada orang militer dan orang rupiah, akan tetapi orang ketjil yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nippon yang berharga 10 sen, 5 sen, dan 1 sen harus juga digunakannya sebagai orang sah.
- Pasal 13: Dilarang pula berbuat perbuatan-perbuatan yang berikut:
 - a) Mengganggu peredaran orang militer dan orang rupiah
 - b) Membayar atau menerima orang lain dari pada orang militer dan orang rupiah
 - c) Memalsukan, mengubah atau memboeng orang militer dan orang rupiah
 - d) Menjimpan atau menjembonjikan orang kertas dan orang ketjil, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Nippon maupun pemerintah yang lain, yang harganya f. 1,- (satu rupiah) kebawah, dijumlahkan lebih dari f. 100,- (seratus rupiah)

(Kan Po, No. Istimewa Th. II Maret 1943, hal 8)

Tidak sulit bagi pemerintah militer Jepang untuk memberlakukan uangnya di masyarakat, karena kedatangan Jepang yang disertai dengan janji kemerdekaan telah mendapat sambutan baik orang-orang Indonesia pada umumnya. Uang kertas yang diedarkan pun memiliki gambar-gambar yang memikat rakyat dengan ciri khas pemandangan dan kebudayaan Indonesia. Misalnya gunung-gunung, candi dan wayang; berbeda dengan gambar-gambar uang Hindia Belanda yang menunjukkan kebesaran Kerajaan Belanda. Selain itu, mata uang Jepang juga beredar di Indonesia.

Mata uang Jepang tersebut adalah *Kobang* dan *Ichibu*, yang kedua-duanya terbuat dari perak (Ghozali, 1969: 6).

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang adalah melakukan tindakan terhadap bank-bank swasta milik musuh. Berdasarkan Undang-Undang No. 44/1942, tanggal 20 Oktober 1942, atas perintah Panglima Tertinggi di Jawa, bank-bank milik musuh dilikwidasi, dan hanya diberi kesempatan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya sampai batas waktu tanggal 20 Nopember 1942 (Kan Po No. 5 Th I Oktober 1942, hlm 8).

Beberapa bank bekas Belanda yang dilikuidasi yaitu, *Javasche Bank*, *Nederlandsche Handels Maatschappij*, *Nederlands-Indische Escomto Bank*, dan *Batavia Bank*. Sedangkan bank-bank milik Inggris dan asing lainnya adalah *The Chartered Bank of India*, *The Hongkong and Shanghai Corporation Ltd.*, *Overseas Chinese Banking Corporation* dan *Bank of China*. *De Algemene Volkscredietbank* yang bergerak di bidang perkreditan pertanian tidak terkena penutupan tersebut, tetapi dilanjutkan usahanya dengan nama *Syomin Ginko*. Kedudukan dan tugas-tugas bank yang telah dilikwidasi tersebut diganti oleh bank-bank Jepang, yaitu *Yokohama Ginko*, *Nitsui Ginko*, *Taiwan Ginko*, dan *Kanan Ginko*. Bank-bank Jepang semua berada di bawah supervisi *Nanpo Kaihatsu Kinko* (Perbendaharaan Untuk Kemajuan Wilayah Selatan). *Nanpo Kaihatsu Kinko* merupakan sebuah bank yang berkantor pusat di Tokyo, bank ini juga bertindak sebagai bank sirkulasi di Indonesia.

B. Kejadian-Kejadian Penting di Bidang Politik

Jatuhnya bom atom di Kota Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 14 Agustus 1945 membuat keadaan Jepang terpuruk, yang diikuti dengan penyerahan kedaulatan Jepang atas Indonesia kembali kepada Sekutu. Disela waktu kekalahan Jepang oleh Sekutu dan penyerahan kembali kedaulatan Indonesia kepada pihak Belanda, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Menurut *Ricklefs*, masa ini merupakan pertama kalinya di dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba (*Ricklefs*, 2007: 317).

Pada waktu Jepang menyerah telah berlangsung begitu banyak perubahan luar biasa yang memungkinkan terjadinya revolusi Indonesia. Jepang memberi sumbangan langsung pada perkembangan-perkembangan tersebut. Terutama di Jawa, dan sampai tingkatan yang lebih kecil di Sumatera, mereka mengindoktrinasi, melatih, dan mempersenjatai banyak dari generasi muda serta memberi kesempatan kepada para pemimpin yang lebih tua untuk menjalin hubungan dengan rakyat (*Ricklefs*, 2007: 297).

Pemimpin-pemimpin Islam juga diberikan preferensi bagi posisi-posisi tertinggi di dalam PETA, tentera sukarela Indonesia di Jawa. Pihak Jepang melihat pimpinan Islam sebagai suatu alat yang sangat baik di dalam mengerahkan para petani tanpa harus membuat konsensi politik yang dituntut kaum nasionalis (*Reid*, 1996: 23). Rakyat yang dilatih militer untuk membantu Jepang dalam memenangkan perang Asia Timur Raya, dan mobilisasi rakyat yang dipimpin langsung oleh para

pemimpin Indonesia selama masa Kependudukan Jepang inilah yang menjadi modal utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, yang terdengar dari salah satu radio yang kebetulan tidak disegel oleh Jepang, membuat para kaum muda revolusioner segera mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamkan kemerdekaan. Meskipun awalnya Soekarno dan Hatta menolak, namun akhirnya mereka setuju untuk memproklamkan kemerdekaan setelah diculik dan diyakinkan di Rengasdengklok. Teks deklarasi kemerdekaan yang anti-Jepang yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh para pemuda, diganti dengan teks proklamasi yang benar-benar meliputi seluruh penduduk Indonesia (Kahin, 1995: 172).

Setelah berdebat mengenai isi dari teks deklarasi kemerdekaan, teks proklamasi akhirnya ditentukan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut di depan rumah pribadinya. Segera setelah itu, bersama pesan pribadi Hatta kepada sahabat-sahabat nasionalisnya, proklamasi tersebut disiarkan diseluruh radio *Domei* Indonesia dan jaringan telegraf oleh para pegawai Indonesia di kantornya yang berada di Jakarta (Kahin, 1995: 173).

Para pemuda Bandung berhasil menyiarkan melalui radio setempat. Dalam setiap pusat utama di Jawa ada pusat golongan elit dan kelompok pemuda yang lebih besar, yang melalui koneksi-koneksinya di ibu kota, mengetahui dan mengerti proklamasi kemerdekaan dalam beberapa hari. Di luar kelompok-kelompok kecil

tersebut proklamasi tidak dipercaya atau dianggap hanya sebagai suatu adegan lain dalam sandiwara yang diselenggarakan pihak Jepang (Reid, 1996: 50).

Setelah itu para pemimpin sibuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan bagi suatu negara yang merdeka diatas pergolakan-pergolakan yang masih terjadi dengan pihak Jepang. Sehari setelah kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengesahkan Undang Undang Dasar dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu dalam rangka melancarkan jalannya roda pemerintahan, pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI juga mengadakan rapat dan Presiden Soekarno menunjuk sembilan orang sebagai anggota Panitia Kecil yang ditugasi menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang meminta perhatian mendesak, yakni pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 160).

Dalam pembentukan kementerian, oleh PPKI dibentuk dua belas kementerian, masing-masing Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan terbentuknya kementerian-kementerian tersebut, berarti pada masa ini Negara Indonesia telah mempunyai organisasi-organisasi sendiri yang akan menangani hal-hal yang diperlukan bagi suatu negara merdeka. Dengan terbentuknya kementerian-kementerian tersebut secara otomatis para pegawai yang semula bekerja pada instansi-instansi Pemerintahan Jepang, kini menjadi pegawai-pegawai kementerian-kementerian Republik Indonesia, termasuk mereka yang sebelumnya bekerja pada *Gunseikanbu Zaimuru*, langsung menjadi

pegawai Kementerian Keuangan dengan menterinya yang pertama Dr. Samsi (Ayatrohaedi, dkk, 1995: 60).

Pada kenyataannya, meskipun sudah merdeka dan di wilayah Indonesia telah berdiri pemerintahan Republik Indonesia, Belanda tetap berkeyakinan bahwa wilayah tersebut masih berada dalam hak pemerintahan Hindia Belanda, karena adanya *status quo* politik dengan pihak Jepang. Dengan berbagai cara Belanda berusaha keras untuk mewujudkan kembali kekuasaannya atas wilayah Indonesia. Sejak saat itu secara *de facto* telah terdapat dua pemerintahan di wilayah Indonesia, yaitu pemerintahan RI dengan pimpinan Soekarno-Hatta dan pemerintahan sipil Belanda NICA dengan pimpinan Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook.

Ketika mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan, Indonesia harus menempuh perjalanan yang sangat sukar, berliku-liku, dan penuh rintangan. Pemerintah Republik Indonesia terpaksa berpindah kedudukan dua kali, yaitu pada awal Januari 1946 hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta, kemudian dalam bulan Desember 1948 Yogyakarta pun harus ditinggalkan dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia menjalankan tugasnya di Sumatera Tengah. Presiden dan Wakil Presiden sendiri harus menjalani penahanan oleh penguasa Belanda. Presiden mula-mula ditahan di Sumatera Utara, kemudian bersama Wakil Presiden dan beberapa pejabat lain di Bangka, yaitu mulai Desember 1948 sampai Juli 1949 (Oey Beng To, 1991: 6).

Pertikaian dan pertempuran dengan pihak Belanda telah menimbulkan banyak penderitaan di antara rakyat jelata serta telah meminta pula banyak korban. Selanjutnya, selama perjuangan disamping menghadapi musuh dari pihak Belanda, dalam tubuh bangsa Indonesia sendiri secara tidak terduga telah muncul kericuhan-kericuhan yang harus dilalui negara yang baru saja merdeka ini.

1. Konflik Intern Pemerintahan Republik Indonesia

Bangsa Indonesia pada masa revolusi, selain harus menghadapi Belanda yang belum mengakui kemerdekaan, juga harus menghadapi persoalan di tubuh para tokoh kemerdekaan itu sendiri. Para pemimpin Bangsa yang sedang mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh suatu negara yang merdeka, dalam prosesnya mengalami perselisihan pendapat dan perbedaan sikap berkaitan dengan berbagai permasalahan politik yang ada, salah satunya mengenai tindakan yang diambil untuk menghadapi Belanda.

Ketegangan dan perselisihan yang terjadi menghambat kelancaran jalannya roda pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu baru saja memperoleh kemerdekaannya. Hal ini berawal ketika pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik (multi partai) yang bertujuan menghindari terjadinya kediktatoran dan sebagai tempat penyaluran aliran paham masyarakat. Pembentukan suatu partai dengan syarat bahwa partai-partai harus turut serta memperkuat perjuangan Republik

Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat (Muljana, 2008: 77).

Maklumat dikeluarkan sebagai tanggapan atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) kepada Pemerintah, yang maksudnya menghilangkan kesan di luar negeri, bahwa Republik Indonesia adalah ciptaan Jepang dengan adanya satu partai, yaitu Poetra, sebagai lanjutan dari *Djawa Hokokai*. Untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia lahir dari keinginan rakyat sendiri dan bercorak demokrasi, dianggap perlu memberikan kesempatan untuk mendirikan partai-partai (Oey Beng To, 1991: 6 – 7).

Pemerintah berharap agar melalui partai-partai tersebut, segenap aliran dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Berdirinya partai-partai politik diikuti dengan berubahnya sistem pemerintahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Pada tanggal 14 November 1945 kabinet presidensial di bawah pimpinan Presiden Soekarno diganti dengan kabinet ministerial dibawah Perdana Menteri Sutan Sjahrir (Kabinet Sjahrir I). Kabinet ini segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 203).

Kurang disadari bahwa dengan lahirnya partai-partai politik baru tersebut lahir pula loyalitas dan antagonisme baru yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Terbentuknya suatu partai merupakan suatu pengelompokkan politik dalam masyarakat menurut aliran-aliran yang pada perkembangannya menimbulkan persaingan antar partai sendiri. Persaingan ini menimbulkan perebutan kekuasaan

yang membawa keretakan dalam menghadapi musuh khususnya (Belanda) dan perpecahan dalam masyarakat pada umumnya.

Persaingan tersebut tercermin ketika Kabinet Sjahrir I dijatuhkan oleh golongan Persatuan Perjuangan (PP) yang diketuai oleh Tan Malaka, dalam sidang KNIP di Solo pada pertengahan bulan Februari 1946. Sebenarnya PP mengharapkan Tan Malaka sebagai formatur kabinet sesuai dengan mayoritas suara dalam KNIP. Namun Presiden dan Wakil Presiden mempertahankan Sutan Sjahrir, yang merupakan anggota Partai Sosialis, sebagai formatur karena kebijakan politiknya sesuai garis mereka, khususnya mengenai politik diplomasi. Sebaliknya Tan Malaka dan kelompoknya menghendaki konfrontasi total terhadap Belanda (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 206).

Ambisi perebutan kekuasaan ini sebelumnya sudah terjadi antara dua tokoh pemimpin kuat Indonesia lainnya, Sutan Sjahrir dan Tan Malaka, sejak Republik Indonesia baru saja merdeka. Pada bulan September 1945, Tan Malaka menemui Soekarno dan menganjurkan agar dirinya dijadikan satu-satunya penerus kepemimpinan Republik apabila Soekarno terbunuh. Mengingat pada saat itu ancaman-ancaman pembunuhan oleh Belanda telah sering Soekarno terima.

Pada pertemuan berikutnya yang dihadiri juga oleh Hatta, Soekarno menyetujui pembuatan testamen politik perlunya menetapkan orang untuk melanjutkan kepemimpinan. Namun Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa Tan Malaka hanya mewakili suatu minoritas pendukung revolusi. Oleh karena itu, mereka

memutuskan untuk membentuk empat-sekawan ahli waris yang terdiri dari para pemimpin yang mewakili empat kelompok utama pendukung revolusi, yaitu: (1) Tan Malaka – mewakili kelompok Marxist Kiri yang ekstrim, (2) Sjahrir – mewakili kaum sosialis moderat, (3) Kusuma Sumantri – mewakili organisasi-organisasi Muslim, dan (4) Wongsonegoro – mewakili golongan ningrat, pegawai negeri gaya lama (Kahin, 1995: 185 – 189).

Selama masa perjuangan sampai diperolehnya pengakuan kedaulatan, kabinet telah silih berganti tidak kurang dari tujuh kali. Setelah Kabinet Presidensil pertama di bawah Presiden Soekarno diganti sifatnya menjadi Kabinet Parlemerter, selanjutnya kabinet parlemerter telah bertukar enam kali, yaitu tiga kali dipimpin oleh Sutan Sjahrir, dua kali dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta dan sebuah kabinet lagi bekerja di bawah Amir Sjarifuddin (Oey Beng To, 1991: 6 – 7).

Penunjukkan kembali Sutan Sjahrir menimbulkan ketidakpuasan pada kelompok Persatuan Perjuangan (PP), yang menjadikan kelompok ini bertindak sebagai oposisi terhadap pemerintahan Kabinet Sjahrir II. Pada tanggal 17 Maret 1946 beberapa tokoh politik pada Kabinet Sjahrir II, khususnya dari Persatuan Perjuangan (PP) ditangkap. Mereka dianggap tidak melakukan oposisi yang sehat dan loyal, tetapi hendak melemahkan pemerintah. Dikatakan ada indikasi kuat bahwa mereka akan mengubah susunan negara diluar Undang-Undang (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 207).

Peristiwa yang sangat mengejutkan yang kemudian terjadi adalah penculikan Perdana Menteri Sjahrir dan Menteri Perekonomian Darmawan Mangunkusumo dari

Solo dan penahanan mereka di Paras (Boyolali) pada akhir Juni 1946 oleh kelompok Persatuan Perjuangan (PP) di bawah pimpinan Tan Malaka. Tuntutan golongan tersebut untuk membubarkan kabinet dan menggantikannya dengan sebuah Dewan Politik dengan Tan Malaka sebagai ketua telah ditolak oleh Presiden. Para Tokoh Persatuan Perjuangan selanjutnya ditangkap. Kejadian tersebut terkenal sebagai “Peristiwa 3 Juli” (Oey Beng To, 1991: 7).

Pergantian kabinet terus terjadi karena ketidak sepahaman pemikiran pada tokoh-tokoh pemerintahan Indonesia. Usaha golongan kiri untuk menguasai Angkatan Perang dilakukan secara bertahap sejak Perdana Menteri terakhir, Amir Sjarifuddin, menjadi Menteri Pertahanan. Berbagai macam tindakan manipulasi dilakukan pada badan pendidikan tentara yang semula dibentuk oleh Markas Tertinggi Tentara Republik Indonesia (TRI) menjadi berada dibawah kendali Kementerian Pertahanan. Namanyapun diganti menjadi Staf Pendidikan Politik Tentara (Pepolit), yang dipimpin oleh opsir-opsir politik yang semuanya berasal dari Pesindo, pendukung Amir Sjarifudin. Pepolit ternyata dieksploitasi oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin untuk kepentingan politiknya sehingga tumbuh menjadi semacam komisaris politik yang sejajar dengan komandan pasukan. Oleh karena itu Pepolit ditolak oleh sebagian panglima divisi dan para komandan pasukan karena dianggap sebagai penyebar ideologi komunis yang berakibat aktivitas Pepolit melemah di daerah-daerah (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 227).

Sesuai dengan keputusan Panitia Besar Reorganisasi Tentara, pada bulan Mei 1946 Menteri pertahanan Amir Sjarifuddin membentuk lembaga baru yaitu Biro

Perjuangan, sebagai badan pelaksana dari Kementerian Pertahanan yang bertugas menampung laskar-laskar yang semula didirikan oleh partai politik. Kelompok Amir Sjarifuddin yang memonopoli Biro Perjuangan ini memasukkan seluruh program dan konsepsi perjuangan partainya, sehingga biro ini lebih merupakan pendukung kekuatan politik Amir Sjarifuddin daripada suatu badan resmi pemerintah dan dalam perkembangan selanjutnya dijadikan adu kekuatan untuk menandingi tentara reguler.

Keadaan semacam ini disadari oleh pemimpin nasional, yang kemudian menyatukan dua kekuatan itu menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada bulan Juni 1947. Namun sebagian besar laskar yang berideologi komunis tidak mau bergabung dengan TNI secara penuh. Adanya struktur organisasi Pucuk Pimpinan TNI yang kolektif dimanfaatkan oleh kelompok Amir Sjarifuddin. Mereka ditampung dalam suatu wadah yang diberi nama TNI Bagian Masyarakat yang dibentuk pada bulan Agustus 1947. Dengan demikian Amir Sjarifuddin berhasil menghimpun kembali kekuatan di bawah naungan nama TNI, dengan konsepsi dan garis politik yang tetap (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 229).

Aktivitas oposisi pihak Amir Sjarifuddin semakin gencar hingga pada saat sesudah kabinet Amir Sjarifuddin jatuh dan digantikan oleh Kabinet Hatta, ia membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang merupakan gabungan partai dan organisasi sayap kiri, yakni Partai Sosialis (PS), Partai Komunis Indonesia (PKI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Mereka menuntut agar Kabinet Hatta dibubarkan dan menyusun program nasional. Namun lagi-lagi pihak Amir Sjarifuddin

gagal, sehingga pada bulan Juni 1948 Front Demokrasi Rakyat menyusun program sendiri yang mereka sebut “Menginjak Tingkat Militer Baru” (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 232).

Puncak dari usaha untuk merebut pemerintahan (oleh golongan kiri) adalah diancarkannya perebutan kekuasaan (kup) di Madiun oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dibawah pimpinan Muso pada tanggal 18 September 1948. Selama hampir satu bulan menghadapi serangan-serangan dari Divisi Siliwangi dan Divisi Jawa Timur dibawah pimpinan Kolonel Sungkono, pasukan Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan perang gerilya yang banyak membawa korban diantara rakyat di Magetan dan Ponorogo. Penumpasan pasukan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak memakan waktu lama, dan pada akhir bulan Oktober 1948 dengan matinya Muso berakhirilah perlawanan PKI (Oey Beng To. 1991:7). Peristiwa ini dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai Pemberontakan PKI, atau G 30s PKI.

2. Jalur Diplomasi Dalam Menghadapi Agresi Militer Belanda

Sehubungan dengan pernyataan resmi bahwa Jepang menyerah terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang diharuskan menyerahkan seluruh daerah kekuasaannya terhadap Sekutu. Hal tersebut tak terkecuali kekuasaan Jepang di Indonesia. Sekutu membentuk *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) sebagai komando khusus untuk mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia.

Tugas pasukan Sekutu di Indonesia pada waktu itu ialah untuk menerima penyerahan dari tangan Jepang; membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu; melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan; menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil; menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan sekutu (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 185).

Dalam kekosongan kekuasaan yang terjadi setelah Jepang menyerah hingga datangnya pasukan Sekutu, revolusi Indonesia sudah dilancarkan dan mendapat reaksi hebat di seluruh pelosok Negeri. Hingga kedatangan pasukan Sekutu pada akhir bulan September 1945, kebijakan yang diambil oleh Jepang tidak pasti dan penuh kompromi. Disatu sisi Jepang mempertahankan *status quo* politiknya hingga pasukan Sekutu mengambil alih, disisi lain mereka berusaha menghindari pertempuran besar dengan revolusi Indonesia (Kahin, 1995: 174). Untuk itu Jepang menangkap orang-orangnya yang mendukung revolusi, dan melucuti persenjataan tentara dan organisasi bersenjata Indonesia bentukan Jepang untuk menekan pertumbuhan militer Indonesia, yang kemudian menimbulkan berbagai perlawanan oleh rakyat Indonesia di daerah-daerah.

Pada awalnya kedatangan pasukan AFNEI selama pertengahan bulan September hingga akhir bulan Oktober 1945, di tiga kota pelabuhan utama di Jawa (Jakarta, Semarang, Surabaya), disambut oleh pihak Indonesia dengan sikap netral. Namun setelah diketahui bersamaan dengan datangnya pasukan sekutu tersebut,

datang pula aparat *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) yang bermaksud menegakkan kembali pemerintahan Belanda di Indonesia, jelaslah bahwa pihak Belanda tidak bersedia melepaskan Indonesia sebagai negeri jajahan yang telah dikuasainya selama lebih dari tiga ratus tahun.

Situasi keamanan dengan cepat memburuk setelah NICA mempersenjatai kembali anggota KNIL yang baru di bebaskan tawanan Jepang, dan menyebabkan kericuhan dengan mengadakan provokasi-provokasi bersenjata di kota-kota yang diduduki sekutu. Pihak Indonesia menilai bahwa Sekutu melindungi kepentingan Belanda. Oleh karena itu, Indonesia bersikap konfrontasi total. Sejalan dengan hal tersebut, timbul bentrokan-bentrokan bersenjata, bahkan terjadi pertempuran di beberapa kota khususnya di kota-kota pelabuhan di Jawa.

Masalah pokok yang dihadapi pemerintah Republik Indonesia saat itu adalah bagaimana mempertahankan kedaulatan negara terhadap Belanda yang datang bersenjata lengkap. Untuk itu dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang terdiri dari para bekas tentara Peta dan Heiho serta barisan ketentaraan angkatan muda yang dimiliki oleh Indonesia. Selain BKR dibentuk pula Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang terbentuk dari bermacam-macam laskar rakyat dengan berbagai senjata, ideologi dan disiplin masing-masing (Oey Beng To, 1991: 75).

Bentrokan-bentrokan bersenjata terus terjadi antara BKR dengan pasukan NICA. Pertempuran besar-besaran melawan NICA yang didukung tentara Sekutu terjadi pada 10 Nopember 1945 di Surabaya. Pertempuran Surabaya tidak lepas kaitannya dengan peristiwa yang mendahuluinya, yaitu usaha perebutan kekuasaan

dan senjata dari tangan Jepang oleh para pemuda Indonesia, yang membangkitkan suatu pergolakan sehingga berubah menjadi situasi revolusi yang konfrontatif.

Pertempuran melawan Belanda diselingi dengan perundingan-perundingan di meja konferensi dengan tujuan agar sengketa di antara kedua negara dapat diselesaikan secara damai. Telah berlangsung 4 perundingan secara resmi antara Indonesia-Belanda sebelum konferensi terakhir, yaitu Konferensi Meja Bundar (KMB), yang akhirnya menghasilkan pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia. Dari empat kali perundingan yang secara resmi diadakan tersebut, dua kali diantaranya diadakan dengan campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perundingan resmi pertama kali diadakan pada bulan April 1946 di Hoge Veluwe, Negeri Belanda. Perundingan ini diadakan setelah terjadi dua kali perundingan antara H.J Van Mook dan Sutan Sjahrir, pada tanggal 10 Februari dan 27 Maret 1946 di Jakarta, dengan disaksikan oleh Sir Archibald Clark Kerr sebagai perwakilan dari Pemerintah Inggris. Namun di dalam perundingan tersebut ternyata pihak Belanda menolak konsep hasil perundingan yang sebelumnya telah terlaksana di Jakarta, terutama usul Clark Kerr tentang pengakuan *de facto* atas kedaulatan Republik Indonesia di Jawa dan Sumatera. Sehingga pada perundingan ini tidak menghasilkan suatu persetujuan apapun (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 203 – 206).

Perundingan kedua diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, sebelah selatan Cirebon. Perundingan ini sebelumnya telah dimulai pada tanggal 7 Oktober di Jakarta. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November 1946

dan tersusun sebagai naskah persetujuan yang terdiri atas 17 pasal. Naskah yang kemudian dikenal sebagai Persetujuan Linggarjati ini antara lain isinya adalah: Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan federasi, yang dinamai Negara Indonesia Serikat (NIS); Pemerintah NIS akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 210 – 212).

Persetujuan ini, yang pada tanggal 23 Maret 1947 ditandatangani secara resmi di Jakarta oleh wakil-wakil Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, menemui banyak kesulitan dalam pelaksanaannya. Sebelum dapat dilakukan secara efektif, pihak Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 melancarkan aksi militer pertama untuk mematahkan perlawanan Republik.

Aksi militer yang oleh pihak Belanda disebut *politioenele actie* adalah penyerbuan tentara Belanda ke daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Pasukan militer Belanda menduduki sebagian kota-kota besar dan kecil di Pulau Jawa dan Sumatera, serta menguasai pelabuhan-pelabuhan utama yang pada waktu itu masih dibawah kekuasaan Republik. Dengan demikian luas daerah yang dikuasai Republik berkurang. Dengan aksi militer tersebut maka Persetujuan Linggarjati tidak terlaksana (Oey Beng To, 1991: 8).

Agresi militer Belanda ini menimbulkan kecaman dari dunia, khususnya India dan Australia. Kedua negara tersebut mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia-Belanda segera diasukkan dalam daftar pembicaraan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 30 Juli 1947. Pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB

menerima kompromi tersebut dan membuat suatu keputusan untuk Indonesia Belanda.

Keputusan tersebut mengharuskan Indonesia-Belanda untuk menghentikan pertempuran dan menyerahkan pertikaian kepada pihak penengah atau ikhtiar perdamaian lainnya; dan melaporkan jalannya pemecahan masalah tersebut kepada Dewan keamanan. Setelah adanya keputusan tersebut, kedua belah pihak resmi melaksanakan gencatan senjata setelah Van Mook mendeklarasikannya pada tanggal 4 Agustus 1947 (Kahin, 1995: 270 – 271).

Meskipun telah dilaksanakannya gencatan senjata, Belanda tetap berlaku semena-mena. Pada tanggal 29 Agustus 1947 secara sepihak mereka memproklamasikan apa yang dinamakan Garis Van Mook (Lampiran 3). Hal tersebut memberatkan Republik karena batas-batas yang diklaim oleh Belanda menutupi jalur-jalur penghubung antara daerah kekuasaan Republik. Oleh sebab itu, pihak Indonesia merasa perlu untuk meminta Dewan Keamanan untuk mengirimkan suatu komisi untuk mengawasi ketaatan kepada perintah Gencatan Senjata (Kahin, 1995: 272 – 274).

Garis Van Mook sendiri merupakan garis demarkasi yang berlaku sesudah aksi militer Belanda yang pertama, sebagai garis batas posisi-posisi Belanda pada saat gencatan senjata. Pasukan Militer Belanda menduduki sebagian kota-kota pelabuhan utama di Pulau Jawa dan Sumatera, yang waktu itu masih berada dibawah kekuasaan Republik. Terlebih lagi seperti diakui Van Mook, dalam jumlah batas kritis, garis demarkasi tersebut ditarik hingga meliputi batas-batas teritorial Republik yang

sebelumnya belum pernah dimasuki pasukan bersenjata Belanda. Daerah yang dikuasai Belanda terutama meliputi kota-kota besar, yaitu Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Padang, Banjarmasin, Pontianak, Makasar, dan Manado (Lampiran 3).

Untuk mengawasi genjatan senjata, Dewan keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) dalam membantu penyelesaian antara Indonesia-Belanda. Komisi dewan ini terdiri dari tiga anggota dewan, masing-masing pihak memilih satu dan yang ketiga ditetapkan oleh kedua dewan yang telah dipilih tersebut. KTN terdiri dari tiga negara, yaitu Belgia sebagai perwakilan Belanda, Australia sebagai perwakilan Indonesia, dan kedua negara tersebut memilih Amerika sebagai negara ketiga (Kahin, 1995: 274).

KTN mulai meminta diadakan perundingan yang merupakan perundingan ketiga diatas kapal Renville, kapal Amerika Serikat yang pada waktu itu berlabuh di Tanjung Priok. Persetujuan Renville diterima dan ditandatangani oleh kedua delegasi dari Indonesia-Belanda pada tanggal 19 Januari 1948. Perundingan tersebut berisi daerah yang dikuasai kedua belah pihak yang pada garis besarnya sama dengan garis Van Mook. Penerimaan persetujuan tersebut menimbulkan krisis politik berupa pengunduran dukungan dari beberapa partai yang mendukung kabinet Sjarifuddin, dan pelaksanaannya menjadi beban Kabinet di bawah Wakil Presiden Hatta karena Amir Sjarifuddin mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri (Kahin, 1995: 290 – 293).

Sebagai kelanjutan dari pembagian wilayah tersebut, Belanda menciptakan Pasundan dan Madura sebagai negara bagian. Pada tanggal 9 Maret 1948 Van Mook mengumumkan bahwa Pemerintah Federal Sementara telah dibentuk, yang pada dasarnya sama saja dengan Pemerintahan Hindia Belanda dahulu. Diproklamirkannya Pemerintah Federal Sementara oleh Van Mook memberikan bukti bahwa Belanda tidak ingin memenuhi Persetujuan Renville. Kenyataan bahwa perkembangan tersebut tidak menimbulkan protes dari Dewan Keamanan, membuat hubungan politik Indonesia-Belanda memanas kembali (Kahin, 1995: 294 – 295).

Perjanjian Renville tidak dapat bertahan lama karena pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer II. Belanda melakukan penyerbuan ke Yogyakarta dari Semarang, yang pada waktu tersebut merupakan Ibukota Republik Indonesia.

Belanda menjalankan sensor ketat terhadap berita-berita dari Indonesia, tetapi kabar tentang agresi Belanda segera diketahui oleh Dewan Keamanan, yang mengeluarkan dua buah resolusi berturut-turut pada tanggal 24 dan 28 Desember 1948. Resolusi-resolusi tersebut tidak digubris oleh pihak Belanda.

3. Pindahannya Ibukota Republik ke Yogyakarta

Kepindahan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, pada tanggal 3 Januari 1946, tidak disertai persiapan yang cukup masak, dan tidak ada sidang yang khusus untuk itu. Keputusan yang sangat mendesak tersebut disebabkan semakin meningkatnya aksi-aksi teror yang dilakukan oleh militer Belanda, tanpa

dapat diatasi oleh pihak Sekutu. Kepindahan tersebut dapat diartikan sebagai protes dingin pihak Republik terhadap sekutu. Karena pada saat itu pemerintah Republik Indonesia sedang menjalankan politik menjauhkan timbulnya peperangan (Oey Beng To, 1991: 50).

Kepindahan ini dilaksanakan karena banyak gedung umum di Jakarta digunakan oleh tentara Sekutu, dan pemerintah Republik Indonesia tidak dapat menjalankan tindakan secara leluasa. Yogyakarta dalam waktu singkat dibanjiri pegawai-pegawai instansi yang ikut pindah ke kota tersebut. Pemerintah Republik Indonesia juga mulai kembali menyatukan masyarakat dengan demokratisasi dan reorganisasi pemerintah yang mengakomodasi kelompok-kelompok gerakan rakyat (Kartodirdjo, 1995: 75).

Selain itu, pendudukan kembali Belanda atas Jakarta pada bulan Januari 1946 berjalan begitu jauh sehingga diputuskan untuk memindahkan ibu kota republik ke Yogyakarta, yang tetap menjadi ibu kota Republik Indonesia yang merdeka selama masa revolusi. Pendudukan Belanda atas Bandung dan Jakarta juga berarti hilangnya kekuasaan Indonesia atas universitas-universitas yang ada di negeri ini. Oleh karena itu, pada tahun 1946 Universitas Gajah Mada dibuka di Yogyakarta (Ricklefs, 2007: 330).

Namun kepindahan Ibukota ke Yogyakarta tidak berarti gangguan-gangguan keamanan dari pihak Belanda terhenti begitu saja. Keadaan Republik Indonesia yang agak payah itu dipergunakan oleh Belanda untuk melancarkan serangan tiba-tiba. Pada tanggal 19 Desember 1948 pagi angkatan perang Belanda menyerbu

Yogyakarta, dan Ibukota Republik Indonesia jatuh ke tangan mereka. Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa orang Menteri dan pejabat-pejabat tinggi ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Bangka, Sumatera Utara (Kansil dan Julianto, 1987: 52).

4. Konferensi Meja Bundar

Atas prakarsa Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru, pada tanggal 20 – 23 Januari 1949, di New Delhi diselenggarakan suatu konferensi khusus tentang Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh sembilan belas negara Asia, beberapa negara Arab, Ethiopia, dan Australia. Putusan-putusan konferensi yang disampaikan kepada Dewan Keamanan menggerakkan dewan untuk bertindak lagi. Dewan kemudian memutuskan untuk membentuk lagi komisi jasa-jasa baik dengan nama Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, atau *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI), dengan wewenang yang lebih luas dan dapat mengambil putusan berdasarkan persetujuan dua diantara tiga anggotanya (Oey Beng To, 1991: 10).

Setelah peristiwa pendudukan oleh Belanda di Yogyakarta, perlawanan dan serangan yang dilakukan pasukan Republik terhadap tentara Belanda semakin meningkat. Suatu peristiwa yang mengejutkan pihak Belanda adalah ketika tentara Republik menyerbu ke dalam kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, dan menguasai kota tersebut selama enam jam. Atas kejadian tersebut, diadakan kembali perundingan keempat kalinya, antara Indonesia dengan Belanda pada tanggal 14 April 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Roem dan pihak Belanda oleh Dr. J. H. van Royen di bawah pengawasan UNCI. Pada tanggal 7 Mei 1949,

persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Roem-Royen, secara resmi diterima oleh kedua pihak delegasi. Inti dari Persetujuan Roem-Royen adalah:

1. Mengeluarkan perintah agar pasukan-pasukan bersenjata Republik menghentikan perang gerilya;
2. Bekerjasama dalam mengembalikan kedamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan;
3. Berpartisipasi dalam suatu Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan yang nyata, tanpa syarat dan penuh kepada Republik Indonesia Serikat (Kahin, 1995: 536).

Pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno dan semua pejabat lainnya yang diasingkan ke Bangka kembali ke Yogyakarta, dan pada tanggal 1 Agustus 1949 persetujuan gencatan senjata antara pihak Indonesia dengan Belanda akhirnya tercapai. Kemudian untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB), berangkatlah delegasi Republik yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, dan delegasi *Bijzonder Federaal Overleg* (BFO) yang dipimpin oleh Sultan Hamid ke Negeri Belanda. KMB diadakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 September 1949 di Kota Den Haag. Konferensi ini dihadiri pula oleh delegasi Belanda yang dipimpin oleh Van Maarseveen, dan beberapa perwakilan dari Komisi PBB.

Setelah beberapa lama mengadakan perundingan dengan delegasi Belanda, dengan dibantu oleh komisi PBB untuk Indonesia, akhirnya pada tanggal 2 November

1949 tercapailah persetujuan KMB. Persetujuan tersebut menghendaki pengakuan kedaulatan lengkap dan tanpa syarat oleh Pemerintah Belanda, sebelum tanggal 30 Desember 1949 atas seluruh daerah Hindia Belanda dahulu kecuali Irian Barat, kepada Republik Indonesia Serikat, suatu Negara Federal yang meliputi Republik Indonesia dan 15 daerah yang telah di bentuk oleh Belanda. Persetujuan KMB disahkan oleh Pemerintah Republik dengan Undang-undang No.10/1949 tertanggal 14 Desember 1949 (Oey Beng To, 1991: 13).

Hasil-hasil pokok dari KMB, antara lain:

- a. Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada Republik Indonesia Serikat (RIS);
- b. Penyerahan kedaulatan akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949;
- c. Tentang Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS;
- d. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Nederland, yang akan dikepalai oleh Raja Belanda;
- e. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa *korvet* akan diserahkan kepada RIS;
- f. Tentara Kerajaan Belanda akan secepat mungkin ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan

dibubarkan, dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan-kesatuan TNI (Kansil dan Julianto, 1987: 56).

Negara Federal bentukan Belanda, Republik Indonesia Serikat, hanya berlangsung tidak lebih dari satu tahun. Hal tersebut dikarenakan, bentuk negara federal tidak sesuai dengan semangat persatuan bangsa Indonesia yang telah ada sejak jaman perjuangan. Disamping itu, pembentukan RIS dipandang oleh bangsa Indonesia sebagai hasil dari politik *divide et impera* yang dilakukan oleh Belanda. Berdasarkan pergolakan yang timbul dari bangsa Indonesia yang menuntut pembubaran RIS dan kembali kepada negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dihapuskan, dan dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

C. Kejadian-Kejadian Penting di Bidang Ekonomi

1. Hiperinflasi Uang Jepang

Masa kolonial Belanda di Indonesia meninggalkan dampak yang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi di masa selanjutnya. Pada struktur perekonomian kolonial memperlihatkan adanya dualisme. Di satu pihak terdapat sektor industri modern yang berorientasi pasar padat modal dan produksi massal. Di pihak lain berkembang sektor ekonomi tradisional yang berorientasi padat karya dan beskala kecil. Gambaran tentang perekonomian Indonesia yang kokoh dan solid sebagai koloni Belanda yang kaya akan hasil-hasil ekspor perkebunannya, tidak tampak lagi pada saat bangsa Indonesia merebut kedaulatan dari negeri Belanda.

Perekonomian Indonesia sangat menderita akibat pergolakan-pergolakan politik dan militer yang dirasakan selama kurang lebih sepuluh tahun sebelum Indonesia akhirnya memperoleh kemerdekaan. Dalam keadaan ekonomi perang, sumber-sumber ekonomi terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kepentingan perang. Segenap tenaga rakyat dikerahkan untuk membantu perjuangan militer dan politik pihak penjajah. Produksi diarahkan pada pembuatan alat-alat kebutuhan perang, sedangkan barang-barang konsumsi tidak cukup tersedia untuk kebutuhan dalam negeri, lagi pula sebagian besar disediakan untuk penjajah.

Belum dapat terlepas dari penjajahan Belanda, pada tanggal 8 Maret Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah kepada bala tentara Jepang. Sejak saat itu Indonesia berada dalam pendudukan Jepang yang membawa dampak perubahan ekonomi besar-besaran. Jepang melakukan penyerbuan ke wilayah selatan dengan tujuan eksploitasi ekonomi dalam rangka mendukung Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer menempati prioritas utama. Perubahan besar lainnya berlangsung di sektor pertukaran dan perdagangan. Hilangnya pasar dan pengurangan tenaga kerja bagi kebutuhan perang mengakibatkan produksi bahan pangan terganggu dan terbelit dalam kesulitan pangan.

Sejak pecah perang dengan Jepang, sebab-sebab yang menimbulkan arus inflasi, mulai tampak di seluruh Indonesia. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang Jepang tanpa nomor seri secara tidak terkendali, tidak diimbangi penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan akibat banyaknya sektor-sektor produksi yang rusak

akibat perang. Golongan yang paling menderita akibat inflasi adalah petani, karena pada zaman Pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang.

Inflasi semakin parah akibat dari beredarnya Uang Jepang yang tak terkendali, berawal ketika NICA dibantu pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia. NICA menyita dan menguasai bank-bank yang berada di Jakarta, dan dari bank-bank tersebut diedarkan uang cadangan yang masih tersimpan. NICA juga berhasil menduduki percetakan Kolff & Co di Jakarta, tempat percetakan Uang kertas Jepang yang diperkirakan masih menyimpan 2,5 milyar. Dengan segera modal yang tidak sedikit ini dipergunakan untuk tujuan operasi dan membiayai pembantu-pembantunya, seperti menggaji pegawai dalam rangka mengembalikan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia (Ekonomi no. 11-12 th. I, 25 Agustus – 10 September 1946, hal 219).

Setiap pegawai Hindia Belanda yang kembali membantu Belanda, diberikan gaji yang tidak diterimanya selama 3,5 tahun penjajahan Jepang. Setiap warga negara Indonesia yang bekerja pada NICA, dan mata-matanya yang turut mengacau dan menghianati rakyat Indonesia diberi pembayaran yang tidak sedikit. Untuk para pembantu Belanda diberi upah dari *f* 500,- sampai *f* 1.000,- sebulan, dan untuk mata-mata perang diberi *f* 100,- per jam. Dengan jalan tersebut uang Jepang diedarkan secara bebas ke masyarakat Indonesia oleh NICA, yang menyebabkan harga barang-barang keperluan sehari-hari membumbung tinggi. Kenaikkan harga-harga tersebut dapat dilihat dari harga rata-rata beberapa bahan makanan pokok di daerah-daerah

yang diduduki oleh NICA dan Sekutu, yaitu Jakarta; Semarang; Surabaya; Bandung; mengalami peningkatan sebagai berikut:



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Barang	Satuan	Harga Pendudukan Jepang	Harga Oktober 1945
Beras	1 Liter	f 0,06.-	f 60.-
Daging	1 Kg	f 0,05.-	f 100.-
Minyak Kelapa	1 Botol	f 0,18.-	f 0,60.-
Ayam	1Ekor	f 0,25.-	f 125.-

Tabel 1. Kenaikan Harga Barang Setelah Revolusi

Sumber: Ekonomi no. 11-12 th. I, 25 Agustus – 10 September 1946, hal 219

Jumlah mata Uang Jepang yang beredar pada masa itu tidak dapat diketahui secara tegas. Perkiraan menurut pihak Jepang jumlah yang ada dalam peredaran di Jawa sebesar 1,5 miliar, dan 3,5 miliar di seluruh Indonesia. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu masih ada 2,5 miliar yang belum diedarkan, yang kemudian digunakan oleh pihak Belanda untuk tujuan operasi dan kebutuhannya menggaji para pegawai. Sehingga lebih kurang taksirannya 6 miliar uang Jepang dan 600 juta uang Belanda lama beredar dalam perekonomian Indonesia pada masa itu (Merdeka, *Sekitar Oeang Repoeblik*, 6 Agustus 1946).

Kementerian Keuangan sebagai instansi yang mempunyai tugas mengatur keuangan negara setelah kemerdekaan RI, tidak dapat langsung menguasai peredaran uang di Indonesia. Hal ini disebabkan pada masa awal pembentukan, instansi tersebut mengalami kesulitan dalam penyusunan organisasi dan administrasi keuangan, akibat dari pembagian daerah kepulauan Indonesia pada masa pendudukan Jepang dalam beberapa daerah militer. Selain itu penyusunan organisasi dan administrasi keuangan pada masa pendudukan Jepang disesuaikan dengan keperluan militer perang. Semua

kekuasaan dikendali oleh staf pemerintahan militer pusat, departemen keuangan dan jawatannya hanya merupakan unit administratif saja (Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1965: 658 - 659).

Keadaan ini membuat ekonomi Republik Indonesia mengalami defisit. Pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan oleh negara sendiri belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Kas pemerintah kosong, karena pada masa sebelumnya kas negara masih dalam kekuasaan Jepang. Pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah akibat bentrokan senjata yang masih berlangsung.

2. Belanda Menyerang dengan Uang NICA

Keadaan perekonomian rakyat Indonesia dianggap belum cukup kacau dengan dihambur-hamburkannya uang Jepang ke dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Belanda kembali menyerang perekonomian Indonesia dengan mengeluarkan uang Hindia Belanda yang baru. Uang ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan Uang NICA, atau uang merah. Menghadapi masalah ini, langkah awal pemerintah Republik Indonesia adalah dengan segera mengeluarkan maklumat pada tanggal 2 Oktober 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

OEANG NICA TIDAK BERLAKOE
MAKLOEMAT PEMERINTAH REPOEBLIK INDONESIA

Oleh pihak NICA telah disebarakan oeng kertas “Nederlandsch-Indie” jang baroe oempamanja oeng kertas f0,50 jang berwarna merah sebelah dan hidjau sebelah. Oeng ini kita anggap tidak lakoe; djanganlah diterima, soepaja djangan timboel inflasi disini.

Pemerintah Repoeblik Indonesia
(Merdeka, *Oeng NICA tidak berlakoe*, 2 Oktober 1945).

Pencetakan dan pengedaran mata uang NICA ini sebenarnya merupakan pelanggaran dari Undang-Undang *de Javasche Bankweet* 1922, yang memberi hak monopoli kepada *de Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi yang memiliki wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang di wilayah Hindia-Belanda. Sedangkan uang NICA dicetak bulan Desember 1942 di Amerika Serikat oleh *American Banknote Company* atas pesanan pemerintah kerajaan Belanda (Rahardjo, 1955: 50). Selain itu, terdapat persetujuan tidak akan ada mata uang baru sebelum ada penyelesaian situasi politik mengenai status Indonesia, untuk menghindari kekacauan di bidang ekonomi dan keuangan (Kedaulatan Rakjat, *Belanda Menjerang Dengan Oeng*, 18 Maret 1946).

Biaya pengeluaran negara pada waktu itu hanya bergantung pada Fonds Kemerdekaan Indonesia (FKI). FKI adalah suatu badan yang mengurus keuangan negara, yang didirikan pada tanggal 22 Agustus 1945. Usaha-usaha FKI dalam menyokong usaha nasional dalam memperkuat keuangan negara, dijalankan dengan mengumpulkan uang dan barang-barang perhiasan dari seluruh lapisan masyarakat. Bantuan diminta dari badan-badan baik Pemerintah maupun partikelir yang diberikan

secara sukarela (Kedaulatan Rakjat, *1 Tahoen Fonds Kemerdekaan Indonesia*, 23 Agustus 1946).

Untuk mempertegas kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengenai penolakan terhadap eksistensi Uang NICA, Pemerintah Indonesia mengeluarkan penetapan yang menyatakan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Mata uang dinyatakan berlaku sesuai Maklumat Presiden RI No. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945 adalah tiga macam mata uang, yaitu mata uang *de Javasche Bank*, mata uang pemerintahan Belanda, dan mata uang Pendudukan Jepang (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 273). Adapun Maklumat Presiden tersebut bunyinya sebagai berikut:

MAKLOEMAT
PENETAPAN MATJAM OEANG SEBAGAI ALAT PEMBAJARAN
DJAKARTA 3-10-1945
PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA

Mendengar:

Oesoel dari Menteri Keoeangan tanggal 2-10-1945.

Menimbang:

- a. Bahwa keadaan pada zaman peroebahan ini memboetoehkan penetapan tentang matjam dan harga dari pada oeang jang masih dianggap berlakoe dalam peredaran;
- b. Bahwa tentang matjam dan harga oeang didaerah loear Djawa dari pada Repoeblik Indonesia beloem tetap dapat diketaoeinja;

Mengingat:

Akan oendang2 Pemerintah Balatentara Dai Nippon dahoeloe di Djawa tanggal 20 boelan 3-1942(M) No. 2.

Memoetoeskan:

Mengeloearkan makloemat jang boenjinja seperti berikoet:

MAKLOEMAT PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA
No. 1/10

Tentang Penetapan matjam oeng sebagai alat pembayaran.

Pasal I.

Sebeloem ada peratoeran lain, maka didaerah Djawa dari Repoeblik Indonesia oeng jang dianggap sah sebagai alat pembayaran dalam peredaran hanjalah matjam oeng jang terseboet dibawah ini:

A. Oeng kertas.

1. Oeng kertas dari "Javasche Bank" dahoele jang dikeloearkan pada tahoen 1925 (M) sampai serta tahoen 1941 (M) terdiri dari 8 matjam jaitoe:

- *f.* 1.000,- (seriboe roepijah)
- *f.* 500,- (lima-ratoes roepijah)
- *f.* 200,- (doea-ratoes roepijah)
- *f.* 100,- (seratoes roepijah)
- *f.* 50,- (lima-poeloeh roepijah)
- *f.* 25,- (doea-poeloeh lima roepijah)
- *f.* 10,- (sepoeloeh roepijah)
- *f.* 5,- (lima roepijah)

2. Oeng kertas Pemerintah "Hindia Belanda" dahoele, jang dikeloearkan pada tahoen 1940 (M) dan 1941 (M) terdiri dari 2 matjam, jaitoe:

- *f.* 2,50 (doea roepijah lima-poeloeh sen)
- *f.* 1,- (satoe roepijah)

3. Oeng kertas Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Djawa dahoele terdiri dari 8 matjam, jaitoe:

- *f.* 100,- (seratoes roepijah)
- *f.* 10,- (sepoeloeh roepijah)
- *f.* 5,- (lima roepijah)
- *f.* 1,- (satoe roepijah)
- *f.* 0,50 (lima-poeloeh sen)
- *f.* 0,01 (satoe sen)

B. Oeng logam jang dikeloearkan oleh Pemerintah "Hindia Belanda" dahoele sebeloem tahoen 1945 (M).

1. Dari emas seharga *f.* 10,- (sepoeloeh roepijah) dan *f.* 5,- (lima roepijah).

2. Dari perak:

- a. Ringgitan seharga *f.* 2,50 (doea roepijah lima-poeloeh sen)
- b. Perakan seharga *f.* 1,- (satoe roepijah)
- c. Tengahan seharga *f.* 0,50 (lima poeloeh sen)
- d. Talenan seharga *f.* 0,25 (doea-poeloeh lima sen)
- e. Pitjisan seharga *f.* 0,10 (sepoeloeh sen)

3. Dari nekel seharga *f.* 0,05 (lima sen)

4. Dari tembaga atau brons:

- a. Gobangan seharga *f.* 0,025 (doea setengah sen)
- b. Senah seharga *f.* 0,1 (satoe sen)
- c. Peseran seharga *f.* 0,005 (setengah sen)

Pasal 2.

Matjam dan mata oeang jang dianggap sah didaerah Repoeblik Indonesia diloear Djawa, akan ditetapkan dengan oendang2 lain.

Pasal 3.

Makloemat ini moelai berlakoe pada waktoe berdirinja Repoeblik Indonesia

Djakarta, 3 Oktober 1945

Presiden Repoeblik Indonesia

(Merdeka, *Makloemat Presiden Repoeblik Indonesia*, 2 Oktober 1945).

Maklumat Presiden tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Di Jakarta, seorang pedagang lebih memilih membakar Uang NICA yang diterimanya, setelah barang dagangannya diambil dan dibayar secara paksa oleh golongan Belanda Indo. Uang NICA juga menerima penolakan dari para pedagang Tionghoa di Pasar Glodok, mereka menghimbau supaya para pedagang meminta uangnya terlebih dahulu sebelum golongan Belanda membeli sesuatu. Di Jogjakarta, murid sekolah menengah dikerahkan masuk kampung, untuk memberantas uang NICA yang terdapat di masyarakat. Selain itu, sebanyak 100.000 orang dari Barisan Kaum Buruh Jogjakarta juga mengajukan mosi memberantas Uang NICA dan segala bentuk usaha yang bermaksud mengembalikan penjajahan di Republik Indonesia (Merdeka, 6 – 10 Oktober 1945).

Di Semarang, bahkan sikap rakyat yang menolak Uang NICA didukung dengan dikeluarkannya pengumuman dari Komandan Brigade Inggris, Brigjen *Bethel*, tanggal 6 Oktober 1945. Pengumuman tersebut berbunyi:

Oeang Nica Tidak Lakoe !

Pengoemoeman dari Pemimpin Tertinggi Rapwi

SEMARANG

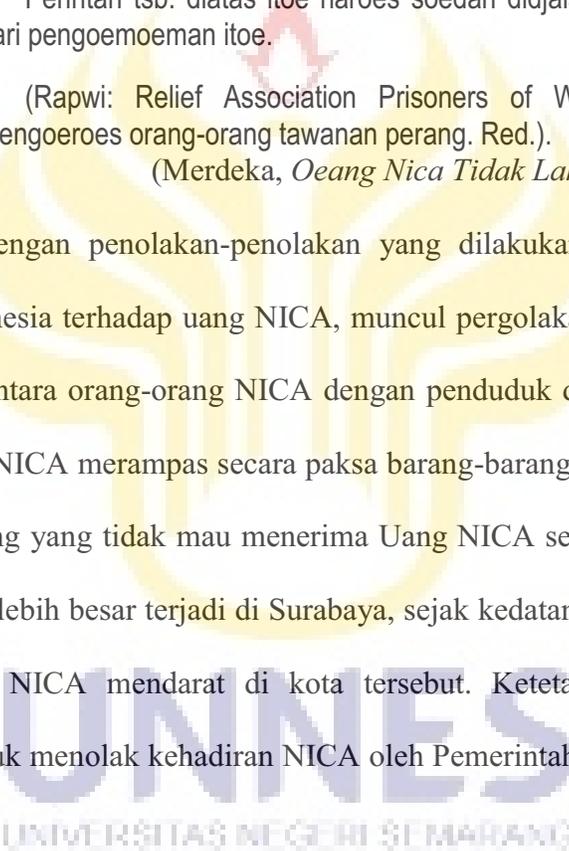
Pada tg. 6 Okt. pemimpin tertinggi Rapwi memerintahkan sbb.:

- 1) Oeang Nica tidak berlakoe hanja Oeang Djepang jang lakoe.
- 2) Semoea anggota Rapwi tidak dibolehkan memakai sendjata.

Perintah tsb. diatas itoe haroes soedah didjalankan sesoedah 48 djam dari pengemoeman itoe.

(Rapwi: Relief Association Prisoners of War Internees = Komite mengeroes orang-orang tawanan perang. Red.).

(Merdeka, *Oeang Nica Tidak Lakoe!*, 10 Oktober 1945).

Seiring dengan penolakan-penolakan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap uang NICA, muncul pergolakan-pergolakan yang tak dapat dihindari antara orang-orang NICA dengan penduduk di tanah air. Tak jarang serdadu-serdadu NICA merampas secara paksa barang-barang yang mereka butuhkan dari para pedagang yang tidak mau menerima Uang NICA sebagai alat pembayaran. Pergolakan yang lebih besar terjadi di Surabaya, sejak kedatangan pihak Sekutu yang diboncengi oleh NICA mendarat di kota tersebut. Ketetapan yang lebih tegas diberlakukan untuk menolak kehadiran NICA oleh Pemerintah Republik di Surabaya, yang berbunyi: 

Oendang2 Oentoek Kota Soerabaja

Moelai malam ini wang Belanda jang doeloe, wang Djepang maoepoen Nica jang baroe tidak ada harganja tidak berlakoe sampai pertempoeran habis. Tindakan ini diambil oleh karena pada waktoe ini banjak mata2 moesoeh jang memponjai banjak wang. Pendoedoek Soerabaja jang banjak wangnja haroes didaftarkan, dan wangnja diganti dengan wang kita sendiri.

Pangreh Pradja, pemimpin rakjat daerah Madoera, Bondowoso, Pasoeroean, Malang dan Besoeki, orang2 yang wangja lebih dari f 200,-

haroes dibeslag dan ditjatat siapa orang ini. Tindakan ini diambil oentoek mentjegah mata2 moesoeh.

Pendjagaan teroetama di pantai2 haroes diperhebat. Rapot2 jang kita terima; agen2 Nica membeli beras dari daerah Pasoeroean; dan jang membeli ini adalah orang2 Madoera. Ada jang membajar dengan wang mas. Dari pantai Pasoeroean beras ini dibawa ke Soerabaja oentoek Nica. Soepaja orang2 jang tidak mempoenjai keterangan jang sah ditangkap.

(Merdeka, *Oeang Belanda dan Djepang tidak lakoe di Soerabaja*, 26 November 1945).

Selain penolakan-penolakan yang terjadi oleh pedagang-pedagang di sebagian besar pasar di Republik Indonesia, sebagian kecil dari golongan elit yang terbatas di Kota Bandung, memiliki pemikiran yang lebih lanjut lagi. Golongan ini mendesak pemerintahan Republik agar segera mencetak uang sendiri, melalui pengajuan mosi terbuka yang berbunyi sebagai berikut:

Mosi Tentang Pengeloearan Oeang Kertas Indonesia

Pengoemoeman Pemerintah Repoeblik Indonesia, tentang tidak berlakoenja oeang kertas NICA menarik perhatian segala pihak, teroetama RAPWI, NICA dan kaki tanganja.

Oentoek mentjegah bahaya inflasi, hingga saat ini hanja Oeang Djepang jang dianggap sah, Pihak Rapwi dll. sesoedah pengemoeman terseboet banjak sekali memakai Oeang Djepang goena menolong Belanda2 bekas tawanan dan keloearanja.

Menoeroet soember jang boleh dipertjaja, djoemlah sokongan tadi sedikit-dikitnja f3,- tiap orang sehari. Ada poela jang menerima gadjinja menoroet keadaan sebeloem perang.

Berhoebong dengan itoe Perserikatan Ahli-ahli Penilik dan Pemegang Boekoe Indonesia di Bandoeng ini telah mengambil mosi sebagai berikoet:

MENGINGAT:

- a. Banjajnja kaoem tawanan serta keloearanja, maka tentoe banjak sekali oeang kertas jang haroes dikeloearkan;
- b. Pada masa jang achir-achir ini banjak sekali oeang kertas Djepang baroe jang keloear dalam peredaran;
- c. Oeang Djepang tadi tidak memakai nomor atau tanda tangan jang moedah di palsoe;

d. Hal yang demikian tadi menambah hebatnya inflasi dan sangat mengatjaukan perekonomian pada oemoemnja dan kehidoepan rakjat pada choesoensja;

e. Bahwa yang sangat menangoeng dan menderita pengaroeh inflasi tadi, teroetama rakjat djelata pada oemoemnja dan kaoem boeroeh pada choesoensja yang terpaksa hidoep dengan penghasilan sedikit dan persaingan hidoep dengan golongan Belanda yang dapat mengeloearkan oeng banjak dan tidak terbatas;

f. Bahwa golongan Belanda selainja menerima sokongan beroepa oeng, djoega beroepa makanan dan pakaian, sedang kaoem boeroeh Indonesia haroes hidoep dengan sangat soekar.

MEMOETOESKAN:

Oentoek mengadjoekan kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia soepaja mengambil tindakan-tindakan sebagai berikoet:

1. Mengeloearkan oeng kertas Indonesia oleh Pemerinta sendiri atau oleh bank Poesat Indonesia, maka oeng harus memakai nomor dan tanda tangan yang berwadjib teroetama oentoek memoedahkan penilikan dan mendjaga pemalsoean;

2. Memberi kesempatan dengan tempo yang terbatas oentoek menoearkan oeng kertas Djepang dengan Oeng Indonesia berdasar pariteit f 10,- = f 10,-;

3. Mendaftarkan segala nama-nama orang yang menoearkan oeng kertas Djepang lebih dari f 5000,- oentoek kepentingan pemoengoetan padjak istimewa oentoek Negeri;

4. Menetapkan bahwa oeng kertas Djepang sesoedah lewat tempo penoearan, tidak berlakoe lagi;

Oentoek kepentingan Rapwi di Indonesia menoeakar oeng Loear Negeri yang sah dengan oeng Indonesia menoeeroet pertandingan (koers) yang ditetapkan oleh pemerintah atau menoeakar oeng Indoneisa dengan barang2 oentoek kepentingan (pertolongan) rakjat Indonesia.

(Kedaulatan Rakjat, 1 November 1945; Surat Kabar Merdeka, 10 November 1945).

Pada waktu itu, Pemerintah Republik Indonesia belum dapat memastikan kapan akan mencetak uang sendiri. Namun, persiapan sudah diusahakan secara keras oleh Pemerintah Republik untuk mengeluarkan uang kertas sebagai Uang Republik yang sah. Menurut keterangan, usaha dalam bidang keuangan sendiri telah lama dipersoalkan, namun keadaan teknislah yang masih menghambat usaha tersebut

(Merdeka, *Republik Indonesia: Mengeloearkan Oeang Kertas dan Perangko*, 21 November 1945).

Usaha mencetak uang oleh Republik Indonesia harus dipercepat, karena jika diabaikan maka akan semakin banyak rakyat yang menjadi korban perampokan dan perampasan oleh serdadu-serdadu India, Belanda dan sebagainya. Bagaimanapun juga, Sekutu mengakui bahwa uangnya di Indoneisa tidak berlaku, dan karena tidak memiliki uang yang berlaku di Indonesia maka terjadilah kekacauan.

Desakan dari rakyat untuk segera mengeluarkan uang sendiri juga semakin sering terlihat di berbagai daerah. Di Garut, pengurus Komite Nasional Indonesia Garut atas nama Kabupaten yang pada waktu itu merasa perlu sekali keluarnya Uang Republik Indonesia secepat mungkin, pada tanggal 18 Desember 1945 telah mengirimkan kawat kepada Presiden, yang bunyinya sebagai berikut :

Oentoek mendjaga soepaja perekonomian rakjat tidak tergangguoe, kami atas nama rakjat Tarogong jang berdjoemlah 54.000 orang, dalam rapat jang dilangsoengkan pada tg. 17 Des. 1945 jang laloe telah memoetoeskan mendesak kepada Pemerintah, soepaja oeang jang lama diganti dengan oeang jang dikeloearkan oleh Pemerintah Repoeblik sendiri.
(Merdeka, *Mendesak Keloearnja Oeang Repoeblik*, 21 Desember 1945).

Keterpurukan perekonomian bangsa Indonesia berlanjut ketika pada tanggal 6 Maret 1946, Letnan Jenderal *Sir Montagu Stopfort* sebagai panglima AFNEI yang baru, mengumumkan secara resmi berlakunya uang di wilayah yang diduduki Sekutu pada tanggal 6 Maret 1946. Uang tersebut dikenal dengan nama uang NICA atau uang merah. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat menurun. Kurs ditentukan 3% yaitu setiap 1 uang Jepang

berbanding dengan 3 sen uang NICA (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 274).

Maklumat tersebut berbunyi sebagai berikut:

MA'LOEMAT

DARI

Lt.-Djenderal Sir M.G.N. STOPFORD, K.B.E., C.B., D.S.O , M.C.,
Panglima Tertinggi Tentara Serikat di Indonesia

Pembaharoean keoeangan

OLEH KARENA:

Pertama: haroes diadakan soeattoe soesoenan keoeangan jang sehat di Indonesia oentoek mentjegah roentoehnja soesoenan ekonomi negeri dan oentoek mengadakan alat pembajaran goena memperbaiki perdagangan biasa,

Kedoea: Pemerintah Keradjaan Belanda adalah Pemerintah jang diakoei berdaulat maka alat pembajaran jang sah hanja oeang Hindia Belanda jang diakoei oleh doenia Internasional sebagai oeang jang sah bagi negeri ini.

MAKA OLEH SEBAB ITOE SAJA MEMBERI PERINTAH SOEPAJA:

Pemimpin2 tertinggi dari A.M.A.-C.A.B. (Allied Military Administration-Civil Affairs Branch) jang berada dibawah pimpinan saja akan mengeloearkan perintah2 jang perloe dan mengambil tindakan2 jang perloe oentoek mengeloearkan oeang Hindia Belanda di negeri ini dan mengatoer pemakaian oeang Djepang boeat sementara serta kemoedian mentjabut oeang Djepang tadi.

Letnan-Djenderal M. G. N. STOPFORD
Panglima Tertinggi Tentara Serikat
di Indonesia

Djakarta, 6 Maret 1946

(Surat Kabar Pandji Ra'jat, 7 Maret 1946).

Sehubungan dengan dikeluarkannya uang NICA yang diakui sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah oleh Sekutu, pemerintah Republik tetap berpendirian bahwa uang tersebut tidak berlaku di wilayah Republik dan menentang

dikeluarkannya maklumat tersebut. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya maklumat oleh kementerian keuangan, sebagai berikut:

MAKLOEMAT No. 6 DARI KEMENTERIAN KEUANGAN

Berhoeboeng dengan beberapa hal jang terjadi pada waktoe jang terachir ini, kami merasa perloe sekali memperingatkan kepada segenap rakjat Indonesia, bahwa Makloemat Presiden Repoeblik Indonesia (tentang penetapan matjam oeng sebagai alat pembajaran), tertanggal 3 Oktober 1945 No. 1/10 **masih tetap berlakoe.**

Djakarta, 6 Maret 1946
MENTERI KEEOANGAN

(Kedaulatan Rakjat, *Oeng Baroe jang Dikeloearkan Belanda Sama Sekali Tidak Berlakoe*, 8 Maret 1946).

Dengan dikeluarkannya maklumat pembaharuan keuangan oleh Letnan Jenderal M.G.N. *Stopford*, uang NICA secara resmi beredar di wilayah-wilayah yang diduduki oleh tentara serikat. Belanda mulai mengedarkan uang barunya di masyarakat dengan cara sebagai upah buruh di wilayah-wilayah yang diduduki oleh Serikat. Akibatnya dikota-kota yang diduduki oleh tentara Serikat, atau lebih tegas lagi di tempat-tempat seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, dll, yang dikuasai oleh Belanda, hampir tidak ada perdagangan. Hal tersebut disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap Uang Jepang dan Uang Belanda sangat kecil, karena Uang Republik sewaktu-waktu akan keluar. Rakyat Indonesia juga tidak mau berdagang, karena mereka tidak mau menerima Uang NICA. Selain itu barang-barang sangat sulit didapatkan karena hasil bumi dan keperluan sehari-hari yang harus didatangkan dari luar kota (kekuasaan Republik).

Produksi barang-barang di perusahaan-perusahaan dalam kota-kota yang dikuasai Serikat juga sangat terbatas atau hampir sama sekali tidak ada. Hal ini disebabkan oleh adanya aksi pemogokan buruh, dimana kaum buruh di Indonesia pada waktu itu telah bertekad tidak mau menerima Uang NICA dan hal-hal lain yang bermaksud mengembalikan imperialisme Belanda di wilayah Republik Indonesia (Ekonomi no. 11-12 th I, 25 Agustus – 10 September 1946, hal 220).

Perdana Menteri RI Soetan Sjahrir memprotes maklumat yang dikeluarkan oleh Panglima tertinggi AFNEI, dengan mengirim surat protes pada tanggal 11 Maret 1946, karena secara terang-terangan pihak Serikat telah melanggar persetujuan yang telah disepakati. Dalam persetujuan tersebut dinyatakan bahwa sebelum adanya penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan dikeluarkan uang baru untuk menghindari kekacauan di bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu intervensi dari pihak Sekutu dengan mengeluarkan maklumat di bawah perlindungan pembesar militer Inggris, menandakan penyerangan secara sungguh-sungguh terhadap kedaulatan kekuasaan Republik Indonesia (Kedaulatan Rakjat, *Belanda Menjerang dengan Oeang*, 18 Maret 1946).

Sejak Uang NICA secara resmi diberlakukan, semakin hari nilainya semakin turun. Tidak saja di daerah-daerah tempat dikeluarkannya, tetapi juga di tingkat Internasional. Jatuhnya nilai Uang NICA disebabkan oleh kurangnya kepercayaan luar negeri dan juga karena penolakan bangsa Indonesia untuk menerimanya (Kedaulatan Rakjat, *Oeang Belanda Djatoeh*, 30 Maret 1946). Kurs Uang Jepang dengan NICA yang semula 1:33, dalam sebulan saja telah merosot sampai ke 1:15,

dan terkadang hingga 1:10 (Ekonomi no. 11-12 th I, 25 Agustus – 10 September 1946, hal 220).

Peresmian diberlakukannya Uang NICA oleh Panglima tertinggi Militer Inggris pun tidak berpengaruh apa-apa, selain menimbulkan kekacauan di kehidupan ekonomi dan sosial di wilayah kekuasaannya sendiri. Belanda tidak dapat mengelak bahwa masyarakat Indonesia lebih memilih uang Jepang sebagai alat pembayaran. Penerimaan Uang NICA di masyarakat Indonesia pada umumnya hanya karena unsur paksaan melalui jalur kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang NICA.

3. Menembus Blokade Ekonomi Belanda

Situasi keuangan Republik Indonesia semakin sulit akibat dilakukannya blokade laut oleh Belanda, yang mulai dilakukan pada bulan November 1945. Blokade laut tersebut menutup pintu keluar masuk perdagangan Republik Indonesia oleh Angkatan Laut Belanda. Adapun alasan Belanda melakukan blokade itu adalah:

- a. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia;
- b. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya;
- c. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 273).

Harga barang-barang persediaan hasil pertanian, yang ditaksir mencapai 200 juta rupiah, sebenarnya dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang

dibutuhkan di Indonesia. Adapun jumlah barang-barang yang dapat diekspor keluar negeri jumlahnya sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah barang ekspor yang ada. Sedangkan jalan yang ditempuh untuk dapat mengekspor barang keluar negeri sangat sulit karena blokade laut dilakukan dengan keras oleh pihak Belanda. Blokade laut ini telah dimulai pada bulan November 1945 dan kemudian dengan resmi dicantumkan dalam surat keputusan, yang dinamai oleh pihak Belanda sebagai Peraturan Perdagangan Belanda, yang dikeluarkan oleh Letnan Gubernur Jenderal Belanda pada tanggal 29 Januari 1947 (Djojohadikusumo, 1953: 12).

Blokade ini berdampak buruk pada kegiatan ekspor impor Republik Indonesia. Barang-barang-barang dagang tidak dapat di ekspor, sehingga banyak barang-barang ekspor yang di bumihanguskan. Selain itu Indonesia menjadi kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Akibatnya kas negara kosong, pajak dan bea masuk sangat berkurang, sehingga pendapatan pemerintah semakin tidak sebanding dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan petani inilah pemerintah RI masih bertahan, sekali pun keadaan ekonomi sangat buruk.

Usaha-usaha untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda dilaksanakan oleh pemerintah dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan sesuatu yang menarik perhatian luar negeri terhadap Indonesia guna melepaskan diri dari isolasi ekonomi dengan negara lain. Adanya produksi petani membantu pemerintah RI untuk berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi blokade laut yang dilakukan oleh Belanda. Dengan adanya produksi beras dari petani,

Indonesia dapat melakukan diplomasi beras kepada India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan, dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Sebagai imbalannya pemerintah India menjanjikan akan mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Keuntungan politik yang diperoleh oleh pemerintah RI adalah dalam forum internasional India adalah negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan kemerdekaan RI (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010: 276). Selain itu, dengan terbukanya perhubungan Indonesia dengan India, terbuka pulalah kesempatan sebesar-besarnya untuk mendatangkan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia (Ekonomi no. 11-12 th I, 25 Agustus – 10 September 1946, hal 222).

Usaha lainnya dari pemerintah adalah dengan mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Diantara usaha-usaha tersebut adalah mengadakan kontak hubungan dengan perusahaan swasta Amerika (*Isbrantsen Inc.*). Usaha ini dirintis oleh BTC (*Banking and Trading Corporation*), suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dan Dr. Ong Eng Die. BTC berhasil mengadakan hubungan dagang langsung dengan perusahaan swasta Amerika Serikat diatas kapal *Martin Behrmann* yang berlabuh di perairan Cirebon. Selain itu, pihak Indonesia juga menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Singapura dan Malaysia. Oleh karena jarak perairan yang relatif dekat, maka usaha ini dilakukan dengan perahu layar dan kapal motor cepat. Pelaksanaan penembusan blokade ini dilakukan oleh Angkatan Laut RI dengan dibantu oleh

pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010:277.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

KESIMPULAN

. Pada bab-bab sebelumnya telah ditinjau keadaan di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan ditariknya uang ORI dari peredaran. Kurun waktu ini merupakan suatu masa perjuangan fisik dan militer, di samping usaha-usaha politik untuk memperoleh pengakuan resmi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Selain masalah politik dengan Belanda, bangsa Indonesia juga harus berhadapan dengan masalah *intern* dari Pemerintahan Republik itu sendiri. Konflik internal perebutan kekuasaan dalam tubuh pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja berdiri, puncaknya menimbulkan aksi pemberontakan PKI pada tahun 1948. Peristiwa pemberontakan tersebut melemahkan bangsa Indonesia dalam menghadapi Belanda.

Keadaan politik semakin buruk ketika Belanda melakukan agresi militer I pada tahun 1947 dan agresi militer II pada tahun 1948, yang diakhiri dengan perjanjian KMB. Selain itu, ketidakamanan kota Jakarta karena pendudukan Belanda, membuat ibukota negara harus dipindahkan ke Yogyakarta. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi politik Indonesia pada saat pemberlakuan uang ORI tidak berjalan dengan baik, dan keadaan tersebut juga berpengaruh pada kondisi ekonomi yang harus dihadapi.

Dalam bidang ekonomi, bangsa Indonesia mengalami *hiperinflasi* atau laju inflasi yang sangat tinggi, akibat dari adanya kekacauan di bidang moneter, disebabkan oleh beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali. Keadaan

bertambah buruk ketika Belanda melakukan blokade laut pada bulan November 1945, sehingga Indonesia tidak dapat melakukan ekspor-impor barang. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya pajak pendapatan yang masuk ke kas negara, tidak sebanding dengan pengeluaran yang diperlukan dalam melawan Belanda, sehingga menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia menjadi lumpuh. Kas negara kosong, dan modal perjuangan hanya bergantung pada pendanaan yang di kumpulkan oleh FKI.

Hal-hal yang disebutkan diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan bidang ekonomi di Indonesia tidak dapat terlepas dari gerak masa sebelumnya. Ketika bangsa Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang, atau lebih ke belakang lagi di bawah penjajahan Belanda, sangat sedikit sekali pegawai-pegawai Indonesia yang diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan dalam Departemen Keuangan. Namun hal ini mempunyai manfaat yang sangat besar, karena menyisakan pegawai ahli setelah masa pedudukan telah lewat. Pegawai ahli ini menjadi tonggak dalam mengambil keputusan dalam perekonomian negara, dalam masa-masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Salah satu keputusan paling besar yang pernah diambil oleh Pemerintah Republik dalam sejarah perekonomian Indonesia, adalah keputusan Pemerintah mengeluarkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) untuk menggantikan uang Jepang yang masih berlaku. Tujuan utama dari pemberlakuan uang ORI adalah untuk menyelamatkan perekonomian, atau yang dikenal dengan istilah politik *senering* uang, yaitu tindakan pemerintah untuk menghilangkan kondisi mata uang tidak sehat yang beredar dalam masyarakat dengan cara memperbaharui nilai mata uang atau

mengantinya dengan mengeluarkan uang baru. Sesungguhnya mencetak uang dalam keadaan kas negara kosong tanpa jaminan berarti pengeluaran defisit. Namun Pemerintah Republik Indonesia masih mampu berjalan membiayai administrasinya, mengorganisir dan memperkuat tentaranya, dan mengurus kesejahteraan rakyat dalam menentang kolonialisme Belanda.

Proses pembuatan uang ORI berdampingan dengan perlawanan fisik bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari kolonialisme Belanda. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, uang ORI membuktikan bahwa tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai alat penukar dan alat pembayaran saja, tetapi uang ORI telah menjalankan pula peranannya sebagai alat yang mempersatukan bangsa Indonesia, dalam mempertahankan kedaulatannya sebagai suatu negara yang merdeka. Dengan kata lain, uang ORI adalah lambang kemerdekaan Republik Indonesia yang berperan sebagai salah satu alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, baik dalam menghimpun tenaga maupun dalam membiayai beraneka macam keperluan negara. Suatu langkah awal pengembangan sistem moneter yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah mampu dan sanggup, untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dan diterima oleh rakyat dan diakui oleh dunia Internasional.

Keputusan lain dari Pemerintah pada waktu itu di bidang moneter adalah, untuk mendirikan Bank Nasional Indonesia (sekarang Bank Nasional Indonesia 1946) yang bertujuan untuk pembentukan bank sirkulasi negara. Meskipun pada akhirnya situasi saat itu belum memungkinkan tercapainya tujuan tersebut, namun BNI telah

berjasa sebagai aparatur pemerintah dalam melaksanakan penarikan uang Jepang dari peredaran dan menggantinya dengan uang ORI.

Uang ORI diberlakukan secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1946, sesuai dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1946 tentang pengeluaran uang ORI. Setelah berlangsungnya perjanjian KMB, Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, dan bentuk negara berubah menjadi Serikat. Sebagai konsekuensinya, uang ORI dan sejenisnya dinyatakan ditarik dari peredaran dan hilang sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah, dan digantikan fungsinya oleh uang federal yang dikeluarkan oleh *De Javasche Bank* yang dipilih sebagai bank sirkulasi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa dalam historiografi sejarah ekonomi Indonesia, permasalahan mengenai pengeluaran uang ORI tidak banyak dibahas oleh peneliti sejarah. Sumber-sumber pustaka untuk bahasan penulisan sejarah uang ORI, penulis temukan tidak semudah seperti untuk bahasan sejarah politik dan sosial. Penulis hanya bergantung pada sumber terbitan berkala seperti surat kabar dan majalah sejaman. Untuk itu, masih banyak hal yang dapat ditemukan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, karena penulis hanya memfokuskan pembahasan mengenai uang ORI yang beredar di Jawa saja. Adanya kesulitan akibat terjadinya berbagai pertempuran, sulitnya komunikasi, dan transportasi, menyebabkan uang ORI tidak sempat diedarkan secara merata ke daerah-daerah. Sehingga beberapa daerah diberi wewenang oleh Pemerintah RI untuk mengeluarkan jenis uang sendiri, yang disebut Oeang Repoeblik Indonesia Daerah

(ORIDA). Topik bahasan mengenai keluarnya ORIDA di berbagai daerah, dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat di daerah tersebut dapat menjadi bahasan untuk penelitian selanjutnya.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Karya Ilmiah

- Anonim. 1965. *20 Tahun Indonesia Merdeka Jilid II*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- , 1981. *Petunjuk Pameran Keliling Numimastik*. Surabaya: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Timur.
- Afrizal. 2013. *Perkembangan Desain Mata Uang Rupiah Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Pada Masa Pemerintahan Soekarno Periode 1945 – 1949*. Tesis Pascasarjana Univesitas Gajah Mada : tidak diterbitkan.
- Ayatrohaedi, dkk. 1995. *Kumpulan Buklet Hari Bersejarah II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- CST, Kansil, dan Julianto. 1972. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1947. *Beberapa Soal Keuangan*. Jakarta: Poestaka Rakjat.
- , 1953. *Persoalan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Indira.
- Ghozali. 1969. *Numimastika Indonesia*. Jakarta: Museum Pusat Jakarta.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermanu. 2009. *Duit, Muntén*. Yogyakarta: Bentara Budaya.
- Iskandar, Mohammad. 2004. "Oeang Repoeblik" dalam *Kancah Revolusi*. *Jurnal Sejarah*. 6(1), 43-62.
- Irsyam, Tri Wahyuning M. 1996. *Sejarah Mata Uang di Indonesia : Studi Kasus Oeang Repoeblik Indonesia*, dalam *Kongres Nasional Sejarah 1996*. 1997. Sub Tema *Dinamika Sosial Ekonomi III*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- Kahin, George McTurnant. 1995. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press.
- Karim, Djani A. 1979. *Mata Uang dan Sejarah*. Jakarta: Proyek Pengembangan Permuseuman DKI Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- , dkk. 1995. *Negara dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Kuntowijoyo, 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kristianiarsi, 1987. *Usaha Pemerintah Republik Indonesia Mengatasi Masalah Moneter Pada Masa Awal Kemerdekaan (1945 – 1946)*. Skripsi Fakultas Sastra Universitas Indonesia: Tidak diterbitkan.
- Leirissa, R.Z. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Limbald, J. Thomas. 2002. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muljana, Slamet. 1997. *Kongres Nasional Sejarah 1996: Subtema Dinamika Sosial Ekonomi III*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- , 2008. *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: LKIS.
- Nurhajarini, Dwi Ratna. 2006. *Sejarah Oeang Republik Indonesia*. Jantra: Jurnal Sejarah dan Budaya. 1(1), 32-39.
- Oey Beng To. 1991. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I: 1945 – 1958*. Jakarta: LPPI.
- Poesponegoro, M.D, dan Nugroho Notokusanto. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, M. Dawam, dkk. 1995. *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah*. Jakarta: LP3S.
- Rahayu, Puji Antari. 2010. *Kajian Grafis Uang Logam Indonesia Periode Tahun 1951 – 2009*. Wimba: Jurnal Komunikasi Visual & Multimedia ITB. 2(1), 33-39.

- Reid, Anthony J.S. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ricklefs, M.C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Solikin, dan Suseno. 2002. *Uang : Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Soesastro, Hadi, dkk. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir Jilid 1 1945 – 1959: Membangun Ekonomi Nasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subagyo. 2010. *Membangun Kesadaran Sejarah*. Semarang: Widya Karya Semarang.
- Waluya, Harry. 1993. *Analisa Dampak Kebijakan Moneter Tahun 1990 – 1993*. Jakarta: Unika Atma Jaya.
- Wasino. 2007. *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*. Semarang: UNNES Press.
- Wiratsongko. (Ed). 1991. *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1990*. Jakarta: Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Perum Peruri.

B. Surat Kabar dan Majalah

- Ekonomi*. 1946. “Arti Pindjaman Nasional 1946”. Edisi 11-12 th. I, 25 Agustus-10 September 1946.
- Ekonomi*. 1946. “Pidato Menteri Loear Negeri SJAHRIR”. Edisi 11-12 th. I, 25 Agustus-10 September 1946.
- Kan Po*. 1942. “Oeandang-Oeandang No. 44 Osamu Sirei No. 13”. Edisi 5 th. II, Oktober 1942.
- Kan Po*. 1942. “Tentang Koeoangan”. Edisi Istimewa th. II, Maret 1943.
- Kedaulatan Rakjat*. 1945. “Mosi Tentang Pengeloearan Oeang Kertas Indonesia”. Edisi 1 November 1945.
- Kedaulatan Rakjat*. 1946. “Oeang Baroe jang Dikeloearkan Belanda Sama Sekali Tidak Berlakoe”. Edisi 8 Maret 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Belanda Menjerang Dengan Oeang”. Edisi 18 Maret 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Oeang Belanda Djatoeh”. Edisi 30 Maret 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Pindjaman Nasional Pekalongan Berdjoemlah *f* 1.108.900,-”. Edisi 29 Mei 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Makloemat Fonds Kemerdekaan tentang Pindjaman Nasional”. Edisi 1 Juni 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “*f*2.000.000,- Dalam Beberapa Jam”. Edisi 8 Juni 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Kewajiban Menjimpan Oeang Dalam Bank bagian I”. Edisi 21 Agustus 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Kewajiban Menjimpan Oeang Dalam Bank bagian II”. Edisi 22 Agustus 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “1 Tahoen Fonds Kemerdekaan Indonesia”. Edisi 23 Agustus 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Awat Oeang Palsoe !”. Edisi 12 September 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Persiapan Pengeloearan Oeang Repoeblik”. Edisi 4 Oktober 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Koetipan dari Soerat Kepoatoesan Menteri Keoeangan”. Edisi 6 Oktober 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Daftar Lampiran Peratoeran Menteri Kemakmoeran No. 2”. Edisi 26 Oktober 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Oeang Repoeblik Berlakoe”. Edisi 29 Oktober 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Penjelasan Wk. Presiden Moh. Hatta Tentang Keloearnja Oeang Repoeblik Indonesia”. Edisi 30 Oktober 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Menoetoep Masa Penderitaan dan Kesoekaran”. Edisi 30 Oktober 1946.

Kedaulatan Rakjat. 1946. “Oeang Palsoe”. Edisi 5 November 1946.

- Kedaulatan Rakjat.* 1946. "Oeang Repoeblik di Jakarta". Edisi 6 November 1946.
- Kedaulatan Rakjat.* 1946. "Penting Bagi Penjimpan Oeang di Taboengan Pos". Edisi 6 November 1946.
- Kedaulatan Rakjat.* 1946. "Peratoeran Menteri Kemakmoeran No. 6". Edisi 12 November 1946.
- Kedaulatan Rakjat.* 1946. "Keterangan Bersama Tentang Hal Oeang". Edisi 23 November 1946.
- Kedaulatan Rakjat.* 1946. "Kedudukan Oeang Kita". Edisi 30 November 1946.
- Kedaulatan Rakjat.* 1946. "1000 Djoeta Dollar oentoek Pembangoenan Indonesia". Edisi 5 Desember 1946.
- Kedaulatan Rakjat.* 1946. "Oeang Repoeblik". Edisi 24 Desember 1946.
- Kedaulatan Rakjat.* 1947. "Tentang Oeang Palsoe". Edisi 13 Februari 1947.
- Kedaulatan Rakjat.* 1950. "Uang URI Akan Ditarik". Edisi 9 Maret 1950.
- Kedaulatan Rakjat.* 1950. "Rebo Uang Baru Diedarkan URI Berlaku Sebagai Biasa". Edisi 21 Maret 1950.
- Kedaulatan Rakjat.* 1950. "Tukar URI". Edisi 27 Maret 1950.
- Merdeka.* 1945. "Oeang NICA Tidak Berlakoe". Edisi 2 Oktober 1945.
- Merdeka.* 1945. "Makloemat Presiden Repoeblik Indonesia". Edisi 2 Oktober 1945.
- Merdeka.* 1945. "Penipoean Dengan Oeang NICA". Edisi 6 Oktober 1945.
- Merdeka.* 1945. "Pemberantasan Oeang Nica". Edisi 7 Oktober 1945.
- Merdeka.* 1945. "Oewang Kertas Nica = Sampah". Edisi 8 Oktober 1945.
- Merdeka.* 1945. "100.000 Kaoem Boeroeh Memprotes Nica". Edisi 10 Oktober 1945.
- Merdeka.* 1945. "Oeang Nica Tidak Lakoe!". Edisi 10 Oktober 1945.
- Merdeka.* 1945. "Mosi Tentang Pengeloearan Oeang Kertas Indonesia". Edisi 10 November 1945.

- Merdeka*. 1945. "Republik Indonesia: Mengeloearkan Oeang Kertas dan Perangko". Edisi 21 November 1945.
- Merdeka*. 1945. "Oeang Belanda dan Djepang Tidak Lakoe di Soerabaja". Edisi 26 November 1945.
- Merdeka*. 1945. "Mendesak Keloearnja Oeang Republik". Edisi 21 Desember 1945.
- Merdeka*. 1946. "Sekitar Oeang Republik: Tindakan Oentoek Menjahatkan Keoeangan". Edisi 6 Agustus 1946.
- Merdeka*. 1946. "Kewajiban Menjimpan Oeang Dalam Bank". Edisi 12 September 1946.
- Merdeka*. 1946. "Keloearnja Oeang Republik ta' Melenjapkan Inflasi". Edisi 14 Oktober 1946.
- Merdeka*. 1946. "Pidato Menteri Keoeangan". Edisi 29 Oktober 1946.
- Pandji Ra'jat*. 1946. "MA'LOEMAT". Edisi 7 Maret 1946.